

**INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL MELALUI PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG**

TESIS

Oleh :

**Armida Fentika
L4D 003 094**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG

Tesis Diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

Armida Fentika
L4D 003 094

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal : 16 Desember 2005

Dinyatakan LULUS
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 14 Agustus 2005

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

(Ir. Wisnu Pradoto, MT)

(Drs. PM. Broto Sunaryo, MSP)

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

(Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Desember 2005

Armida Fentika
L4D 003 094

Tesis ini Kupersembahkan untuk
Kedua Orang Tua, Suami dan Anak
Tercinta

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan izin NYA tesis dengan judul “ INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG ” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak :

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Walikota Tanjungpinang atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program S2 MTPWK UNDIP.
3. Drs. PM Broto Sunaryo, MSP selaku Mentor, yang banyak memberi masukan dan pengayaan materi pariwisata.
4. Ir. Wisnu Pradoto, MT selaku co-Mentor, yang memberi bimbingan dan tuntunan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Ir.Ragil Haryanto, MSP dan Samsul Ma’rif, SP,MT selaku Dosen Penguji dan Pembahas yang telah memberikan masukan – masukan penting bagi tesis ini.
6. Pimpinan dan Staff Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang atas toleransinya selama ini.
7. Suami dan anakku tersayang, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan program magister ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan tesis ini, kritik dan saran juga sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Tanjungpinang, Januari 2006

Penulis

ABSTRAK

Relatif kecilnya PAD terhadap total penerimaan di sebagian besar daerah menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini seringkali terjadi karena banyak daerah atau kota yang menganggap bahwa PAD merupakan suatu ukuran kemandirian suatu daerah. Secara umum, peluang untuk melakukan intensifikasi pajak masih dimungkinkan karena masih banyak terjadinya *tax evasion/avoidance* (penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak), kelemahan pada pemerintah daerah atau kota dalam menghitung potensi pajaknya, maupun rigiditas penentuan tarif pajak. Sementara itu sejumlah daerah juga berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan pajak daerah, sehingga *collection ratio* dan *effectiveness* nya dapat ditingkatkan dan dapat disusun program rencana tindak (*action plan*) peningkatan penawaran pajak hotel di Kota Tanjungpinang. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : menghitung potensi aktual penerimaan pajak hotel untuk dipungut melalui intensifikasi guna meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang, mengkaji pengembangan sector pariwisata sebagai pemacu pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang, meningkatkan intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang dalam bentuk program rencana tindak (*action plan*) serta merekomendasikan pelaksanaan program rencana tindak penerimaan pajak hotel Kota Tanjungpinang

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Dalam studi ini juga digunakan pendekatan deskriptif analitik. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (1999 : 112) yang menyebutkan bahwa pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk “ menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”

Dari Hasil studi ditemukan bahwa Potensi pajak hotel untuk hotel berbintang dalam 1 bulan sebesar Rp. 182,688,000,- sedang untuk hotel melati potensi pajak hotel sebesar Rp. 147,552,000,- dan total keseluruhan pajak selama 1 bulan sebesar Rp. 330.240.000,-. Dari besaran nilai pajak per bulan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun didapatkan besaran potensi pajak hotel di Kota Tanjungpinang adalah Rp. 3.962.880.000,-. Terlihat bahwa potensi riil dari Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang sangatlah tinggi, dengan asumsi tingkat *occupancy* 40 % didapatkan potensi pajak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2003 adalah lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan.

Beberapa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka intensifikasi pajak hotel Kota Tanjungpinang adalah : meningkatkan iklim perdagangan jasa serta pariwisata di Kota Tanjungpinang yang lebih kondusif melalui pemberian insentif pajak dan perizinan yang mudah serta menetapkan target obyek pajak serta strategi dalam merealisasikannya dengan lebih rasional dan operasional.

Kata Kunci : pajak, intensifikasi

ABSTRACT

Municipalities are competing to generate their Local Original Revenue (PAD) intensively or extensively. They consider Local Original Revenue as a measurement of self sufficient level. Tax evasion/ avoidance can be subjected in tax intensification. Besides, weakness of municipals in counting their tax potential and rigidity in tax calculation still become barriers. Some regions are competing to generate Local Original Revenue by tax extension.

This research tends to identify region tax role, so that collection ratio and effectiveness can be raised and it can be arranged the action plan of hotel tax generating offer in Tanjungpinang city. Target to be observed are : to calculate actual potential of hotel tax revenue to be collected as Local Regional Revenue, to study development of tourism sector as a developing trigger of Tanjungpinang city, to generate hotel tax intensification in Tanjungpinang city in the form of action plan, and to recommend action plan program of hotel tax in Tanjungpinang city.

Approaches used are normative and descriptive – qualitative either for quantitative or qualitative analysis. Normative approach is an approach based on a certain ideal rule. It is also used descriptive – analytical approach. According to Sugiyono (1999 ; 12) descriptive approach can be used to analyze data by describing collected data without any effort to generalize it.

From the study, found that hotel tax potential for star hotel in one month is Rp.182,688,000,- whereas for Jasmine hotel tax potential is Rp.147,552,000,- and the total tax for one is Rp.330,240,000,-. In one year period it can be calculated as of Rp.3,962,880,000,-. It means that the real potential of hotel tax in Tanjungpinang is very high, with the assumption for occupancy rate is 40% it can be concluded that in 2003, the hotel tax potential of Tanjungpinang city is as many as 200% form the target. The fact is that the collected tax was only 85% form the target.

Several recommendations for municipal of Tanjungpinang city in order to intensify the hotel tax of the city : to generate service and tourism atmosphere by giving easiness and facilities of tax and license, state the tax target and the strategy to realize it more rationally and operationally.

Keywords : tax, intensification

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR PETA	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan dan Sasaran	8
1.4. Ruang Lingkup	9
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	9
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	12
1.4.3 Originalitas Penelitian	12
1.5. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Pendekatan Studi	16
1.7. Metodologi	17
1.7.1 Kebutuhan Data	17
1.7.2 Teknik Sampling	18
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	20
1.7.4 Teknik Analisis Data	21
1.6. Sistematika Pembahasan	23

Bab II	Intensifikasi Pajak Hotel	
2.1	Pengertian Pajak Hotel	26
2.2	Pengelolaan Pajak Hotel	27
2.3	Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah	28
2.4	Ketentuan Mengenai Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32
2.5	Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah ...	36
2.6	Optimalisasi Pungutan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	38
2.6.1	Intensifikasi Pajak	38
2.6.2	Model Leviathan	40
2.7	Fungsi Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	42
2.8	Pengembangan Pariwisata	45
2.9	Intensifikasi Pajak Hotel	49
Bab III	Kajian Umum Kota Tanjungpinang dan Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	
3.1	Kajian Umum Kota Tanjungpinang	52
3.1.1	Aspek Perkembangan Kota	52
3.1.2	Aspek Perwilayahan dan Administratif	54
3.2	Kajian Sosial Kependudukan, Budaya dan Pariwisata	56
3.2.1	Jumlah, Kepadatan, Sebaran Penduduk Kota Tanjungpinang	57
3.2.2	Potensi Budaya dan Pariwisata	59
3.3	Kajian Perekonomian	61
3.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	68
3.3.2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	73
3.3.3	Sektor Unggulan	75
3.3.4	Pendapatan Kota Tanjungpinang	79
3.4	Kajian Umum Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	83
3.4.1	Potensi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	83
3.4.2	Collection Ratio Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	84

3.4.3	Effectiveness Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	84
3.4.4	Efisiensi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	85
3.4.5	Upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel	87
Bab IV	Analisis Intensifikasi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	
4.1	Analisis Potensi Pajak dan Collection Ratio Hotel di Kota Tanjungpinang	90
4.1.1	Potensi Pajak Hotel	90
4.1.2	Collection Ratio	96
4.2	Analisis Pemungutan Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang	99
4.3	Analisis Pengembangan Obyek dan Atraksi Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pajak Hotel	103
4.4	Strategi Pengembangan Wisata dalam rangka Intensifikasi Pajak Hotel	105
4.4.1	Identifikasi Faktor Lingkungan Strategis	105
4.4.2	Analisis Faktor Internal	108
4.4.3	Analisis Faktor Eksternal	110
4.4.4	Matriks Internal – Eksternal	111
Bab V	Penutup	
5.1	Temuan Studi	118
5.2	Kesimpulan	119
5.3	Rekomendasi	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2002 dan 2003	5
Tabel 2.1	Rangkuman Teori	51
Tabel 3.1.	Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tanjungpinang dan Luas Wilayahnya Tahun 2003	55
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2003	57
Tabel 3.3.	Kepadatan Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2003	57
Tabel 3.4.	PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 – 2001 (Jutaan Rupiah).....	63
Tabel 3.5.	Disribusi Persentase PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 – 2001 (%)	64
Tabel 3.6.	Ekspor dan Impor Barang Melalui Pelabuhan Tanjungpinang Tahun 2001	67
Tabel 3.7.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996 – 2000 (Jutaan Rupiah) ...	70
Tabel 3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB dan Sektor Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungpinang Tahun 1998 – 2001 (%)	71
Tabel 3.9.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 1996/1997 – 1999/2000	74
Tabel 3.10.	Distribusi Persentase Pendapatan di Kota Tanjungpinang (%) Tahun Anggaran 1996/1997 – 1999/2000	74
Tabel 3.11.	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan '93 di Kota Tanjungpinang 1997 – 2001 (%)	77
Tabel 3.12.	Urutan Peranan dan Laju Perumbuhan Dari Tertinggi – Terendah Berdasarkan PDRB Atas Harga Konstan '93 di Kota Tanjungpinang	78
Tabel 3.13.	Realisasi Penerimaan Kota Tanjungpinang Tahun 2003	79
Tabel 3.14.	Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang TA 1999/2000	80
Tabel 3.15.	Pendapatan Regional Per Kapita Tahun 1997 – 2001 di Kota Tanjungpinang	82
Tabel 3.16.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Tanjungpinang Tahun 2002 dan 2003	84
Tabel 4.1.	Kebutuhan Data Studi Identifikasi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang	91
Tabel 4.2.	Estimas Pajak Hotel Melati	93
Tabel 4.3	Estimasi Pajak Hotel Berbintang	95
Tabel 4.4	Target Penerimaan Pajak Hotel	97
Tabel 4.5	Strategi Pengembangan Kawasan Wisata di Kota Tanjungpinang berdasarkan Analisis SWOT	106
Tabel 4.6	Matriks Faktor Strategis Internal	108
Tabel 4.7	Matriks Faktor Strategis Eksternal	110
Tabel 4.8	Matriks SWOT	113

DAFTAR PETA

Peta	1.1.	Peta Wilayah Kajian	10
Peta	1.2	Pete Lokasi Hotel	11
Peta	4.1	Peta Lokasi Obyek Wisata	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.	Kerangka Pemikiran Studi Intensifikasi Pajak Hoel Kota Tanjungpinang	15
Gambar 2.1.	Model	Leviathan 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengaturan pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam pemerintahan yang terdesentralisasi akan menimbulkan masalah bagi harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah, apabila tidak diatur secara jelas dan adil.

Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas Desentralisasi daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat menentukan sekali tingkat kemandirian suatu daerah, karena pada hakekatnya otonomi daerah itu adalah kemandirian.

Secara makro, pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan – perubahan yang cukup nyata pada pola hubungan antara anggaran pemerintah pusat dan daerah. Secara umum terlihat bahwa desentralisasi membawa peningkatan pada *expenditure assignment* (pengeluaran/ belanja) pemerintah daerah sementara *revenue assignmentnya* (pendapatan) justru menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan

bahwa makin banyak tanggung-jawab diberikan kepada daerah sementara kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan justru relatif menurun. Fenomena ini terjadi karena pajak-pajak yang dipegang oleh pemerintah daerah atau kota adalah relatif pajak-pajak yang bersifat elastis terhadap tarif pajak (besaran tarif pajak relatif tidak terlalu besar). Kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran inilah yang ditutup oleh pemerintah pusat melalui ketentuan bagi hasil dan DAU.

Relatif kecilnya PAD terhadap total penerimaan di sebagian besar daerah menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini seringkali terjadi karena banyak daerah atau kota yang menganggap bahwa PAD merupakan suatu ukuran kemandirian suatu daerah. Secara umum, peluang untuk melakukan intensifikasi pajak masih dimungkinkan karena masih banyak terjadinya *tax evasion/avoidance* (penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak), kelemahan pada pemerintah daerah atau kota dalam menghitung potensi pajaknya, maupun rigiditas penentuan tarif pajak. Sementara itu sejumlah daerah juga berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi pajak. Upaya ini apabila tidak dilakukan secara cermat akan justru menimbulkan distorsi (kesenjangan) terhadap pasar serta menciptakan disinsentif bagi iklim usaha dan investasi. Oleh karena itu, upaya demikian dikhawatirkan justru menciptakan *trade-off* antara tujuan jangka pendek (meningkatkan penerimaan melalui peningkatan PAD sebanyak-banyaknya) dan tujuan jangka panjang (meningkatkan penerimaan melalui peningkatan PDRB karena munculnya berbagai kegiatan investasi dan kegiatan usaha di daerah).

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara, 2000 : 5) dan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik (Kahu, 2001;61). Istilah keuangan disini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang bahwa kebijaksanaan di bidang Keuangan Daerah, ditujukan kepada peningkatan peranan potensi Daerah Kota Tanjungpinang menjadi kekuatan inti dalam proses pembangunan daerah. Terlaksananya efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah serta mantapnya Manajemen Keuangan Daerah, dapat diartikan bahwa :

1. Peningkatan potensi daerah Kota Tanjungpinang menjadi potensi riil dalam proses pembangunan daerah, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin berkembang dan hubungan yang serasi antara Keuangan Pusat dan Daerah senantiasa tetap terjamin.
2. Pengupayaan terwujudnya efisiensi pembiayaan terutama yang bertalian dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah melalui peningkatan disiplin anggaran dalam rangka penghematan pengeluaran daerah.
3. Pemantapan manajemen keuangan daerah melalui peningkatan mutu kemampuan aparatur serta menyempurnakan organisasi dan tata kerjanya, dengan upaya menyediakan sarana yang diperlukan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang melalui berbagai upaya berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, seperti usaha intensifikasi serta penggunaan sistem dan metode kerja yang tepat dengan diimbangi upaya penyediaan tenaga yang cukup memadai, baik mutu maupun jumlahnya.

Sebagai unsur pelaksana urusan otonomi daerah bidang pendapatan, Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok utama untuk melakukan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah baik terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

Sehubungan dengan fungsi Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang sebagai koordinator dalam pelaksanaan pungutan lain yang sah yang menjadi hak tagih dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan cara memintakan laporan/data serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan dan usaha-usaha dinas/instansi yang mengelola pungutan daerah, mengadakan pembahasan serta merencanakan usaha dan tindakan yang lebih efektif dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

Dikeluarkannya Undang – Undang Nomer 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang – Undang Nomer 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomer 65 dan 66 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, membawa banyak perubahan mendasar yang terjadi baik dari segi tata cara pengenaan, perlakuan, dihapuskannya dan ditambakkannya beberapa pungutan Pajak dan Retribusi dari sumber – sumber penerimaan asli daerah serta adanya perubahan objek dan subjek pajak tentu menambah permasalahan bagi kabupaten / kota yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

Di satu pihak Dinas Pendapatan Kota harus meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi di lain pihak pemerintah pusat menghapus banyak pungutan – pungutan yang

potensial dari pajak dan retribusi daerah. PAD yang ada saat ini masih jauh dari harapan kita semua, hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pencapaian target PAD. Dalam dua tahun terakhir setelah Kota Tanjungpinang menjadi kota otonom, penerimaan tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan, tahun 2002 dari target Rp 5,29 milyar terealisasi sebesar Rp 4,69 milyar (88,72 %). Sementara tahun 2003 dari target yang ditetapkan khususnya di sektor pajak sebesar Rp 7,791 milyar terealisasi sebesar Rp 7,17 milyar (92,04 %). Lebih jelasnya data penerimaan pajak 2 tahun terakhir yaitu 2002 dan 2003 adalah sebagai berikut :

TABEL I.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2002 DAN 2003

Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Dasar Hukum
	2002	2003	2002	2003	
Pajak Hotel	1300.000.000	1.500.000.000	1.157.356.226	1.331.896.728	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Restoran	350.000.000	1.500.000.000	875.789.705	1.357.059.476	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Hiburan	75.000.000	225.000.000	152.427.393	215.659.240	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Reklame	450.000.000	900.000.000	809.186.691	927.136.121	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Penerangan Jalan	1.650.000.000	3.000.000.000	1.462.876.155	2.966.688.960	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Parkir	-	5.000.000	-	-	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Pengambilan Galian Gol. C	25.000.000	661.199.000	235.243.124	372.572.756	Perda No. 1 Th. 2004
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	-	-	538.200	44.850	Perda No. 1 Th. 2004
Jumlah Pajak Daerah	5.290.000.000	7.791.199.000	4.693.417.494	7.171.058.131	

Sumber : Dispenko Tanjungpinang tahun 2004 yang diolah

Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Hotel. Target pungutan pajak tahun 2002 sebesar Rp 1,3 milyar dan realisasinya hanya Rp 1,157 milyar dan pada tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp 1,500 milyar serta realisasinya Rp 1,331 milyar (89,09 %).

Membahas perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Tanjungpinang tidak lengkap hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau

tahun pajak berjalan, tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak hotel dan restoran itu sendiri. Berdasarkan pengamatan di lapangan, realisasi pajak hotel dan restoran sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.1 belum menunjukkan realisasi yang sesungguhnya jika dilihat dari potensi yang ada. Realisasi penerimaannya masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi dengan catatan perlu upaya intensifikasi baik melalui proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakan peraturan dan pengawasan serta perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan Pajak Hotel. Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya yang ada di Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang sebagai pengelola pajak hotel, baik sumber daya manusianya, maupun fasilitas pendukung kegiatannya.

Dengan demikian, Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang sebagai pemungut Pajak Hotel menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan penerimaan, karena pajak hotel merupakan penyumbang pajak terbesar (primadona) diantara penerimaan pajak-pajak daerah lainnya. Untuk itu Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang dituntut untuk melakukan upaya langkah-langkah guna meningkatkan / intensifikasi pajak hotel, agar penerimaan dari pajak hotel memiliki effectiveness yang cukup tinggi.

Seperti diketahui keberadaan hotel memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuhnya aktifitas – aktifitas lainnya seperti pariwisata, perdagangan dan Jasa. “*Lingkage Activity*” (aktifitas yang saling berkait) yang sangat banyak dari keberadaan fasilitas hotel harus dapat dilihat sebagai potensi untuk mengembangkan aktifitas perkotaan secara keseluruhan. Artinya mekanisme peningkatan penerimaan pajak hotel harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya kualitas maupun kuantitas (meskipun harus tetap dikendalikan) hotel yang ada di Kota Tanjungpinang, sehingga dapat mendukung “*lingkage activity*” nya.

Memperhatikan fenomena di atas, menarik kiranya untuk dilakukan studi yang mengarah pada intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan pungutan pajak hotel di Kota Tanjungpinang, beberapa permasalahan tersebut adalah :

- Kelemahan pemerintah daerah dalam menghitung potensi Pajak Hotel.
- Rendahnya pencapaian target PAD, baik *collection ratio* (pemungutan) maupun keefektifitasannya.
- Proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakan peraturan dan pengawasan perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan yang masih kurang maksimal

Potensi pajak hotel yang sangat besar di Kota Tanjungpinang, belum dapat maksimal didapatkan oleh pemerintah kota, baru sekitar 55% yang memberikan kontribusi pada PAD. Oleh sebab itu diperlukan sebuah penelitian dengan tema intensifikasi pajak hotel Kota Tanjungpinang. Hal ini sangat relevan mengingat Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom, dan kota jasa / perdagangan serta pariwisata dituntut untuk menggali secara optimal atas potensi pajak hotel tersebut.

Selanjutnya untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, serta fokus pada permasalahan yang diteliti, maka pertanyaan penelitian yang dapat diangkat dalam studi adalah : “ **Bagaimana Mengintensifkan Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang ?**”

1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan pajak daerah, melalui pengembangan pariwisata dapat ditingkatkan dan dapat disusun program rencana tindak (*action plan*) peningkatan penawaran pajak hotel di Kota Tanjungpinang.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Menghitung potensi aktual penerimaan pajak hotel untuk dipungut melalui intensifikasi guna meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang.
- Mengkaji kemampuan Dinas Pendapatan Kota dalam menggali sumber potensi melalui sektor pajak hotel dalam melaksanakan peningkatan penerimaan pajak hotel melalui intensifikasi terkait dengan pengembangan aktifitas di Kota Tanjungpinang
- Mengkaji pengembangan sector pariwisata sebagai pemacu pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang
- Meningkatkan intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang dalam bentuk program rencana tindak (*action plan*) peningkatan penerimaan pajak hotel.
- Merekomendasikan pelaksanaan program rencana tindak penerimaan pajak hotel Kota Tanjungpinang.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang dikaji dalam studi ini adalah wilayah administrasi Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 kecamatan, sebagai suatu entitas daerah otonom yang selalu menyelenggarakan kegiatan penyusunan usulan program pembangunan setiap tahun dan sebagai daerah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang harus dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Peta wilayah kajian dapat dilihat pada Gambar 1.1.dan Gambar 1.2 Persebaran Lokasi Hotel di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Secara substansial, ruang lingkup materi yang akan dilakukan dalam studi ini adalah meliputi :

1. Penelaahan potensi penerimaan dari sumber pajak hotel yang masih dapat digali secara intensif guna meningkatkan PAD.
2. Identifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari keberadaan Hotel di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini fasilitas – fasilitas yang disediakan, atraksi wisata yang ditawarkan maupun aktifitas umum yang berkembang di Kota Tanjungpinang.

3. Identifikasi faktor eksternal peluang maupun kendala yang dihadapi dalam upaya intensifikasi pajak hotel di Tanjungpinang. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata serta pengusaha yang (melakukan bisnis) berbisnis di wilayah Kota Tanjungpinang merupakan potensi yang harus dimaksimalkan.
4. Intensifikasi pajak hotel, sehingga nilai dalam penarikan pajak dan efektifitasnya dapat ditingkatkan, dimana dalam meningkatkan pajak hotel ini akan dikaitkan dengan peningkatan pajak hotel dalam skala ruang Kota Tanjungpinang.

1.4.3 Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian dengan tema intensifikasi pajak maupun pengembangan pariwisata yang pernah dilakukan, antara lain :

- 1) Penelitian oleh Murzani pada tahun 2002 dengan judul Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhoksumawe (Tesis MTPK UNDIP)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui model – model ekstensifikasi pajak dan retribusi yang sesuai untuk dikembangkan di Kota Lhoksumawe dalam rangka peningkatan PAD.

- 2) Penelitian oleh Agus pada tahun 2003 dengan judul Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka (Tesis MTPK UNDIP)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui model – model ekstensifikasi pajak dan retribusi yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Kolaka pasca pemekaran wilayahnya.

3) Penelitian Budi Suharto pada tahun 2003 dengan judul Pengembangan Pariwisata Sebagai Sumber PAD Kota Yogyakarta (Tesis MPKD UGM).

Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta terutama dalam rangka meningkatkan PAD Kota Yogyakarta.

4) Penelitian oleh I Nengah Wiarnanta pada tahun 2002 dengan judul Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram (Tesis MTPK UNDIP)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jenis – jenis pajak daerah dan retribusi dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan.

5) Sedangkan penelitian yang kami lakukan berjudul Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mengidentifikasi peranan pajak daerah, melalui pengembangan pariwisata dapat ditingkatkan dan dapat disusun program rencana tindak (action plan) peningkatan penawaran pajak hotel di Kota Tanjungpinang

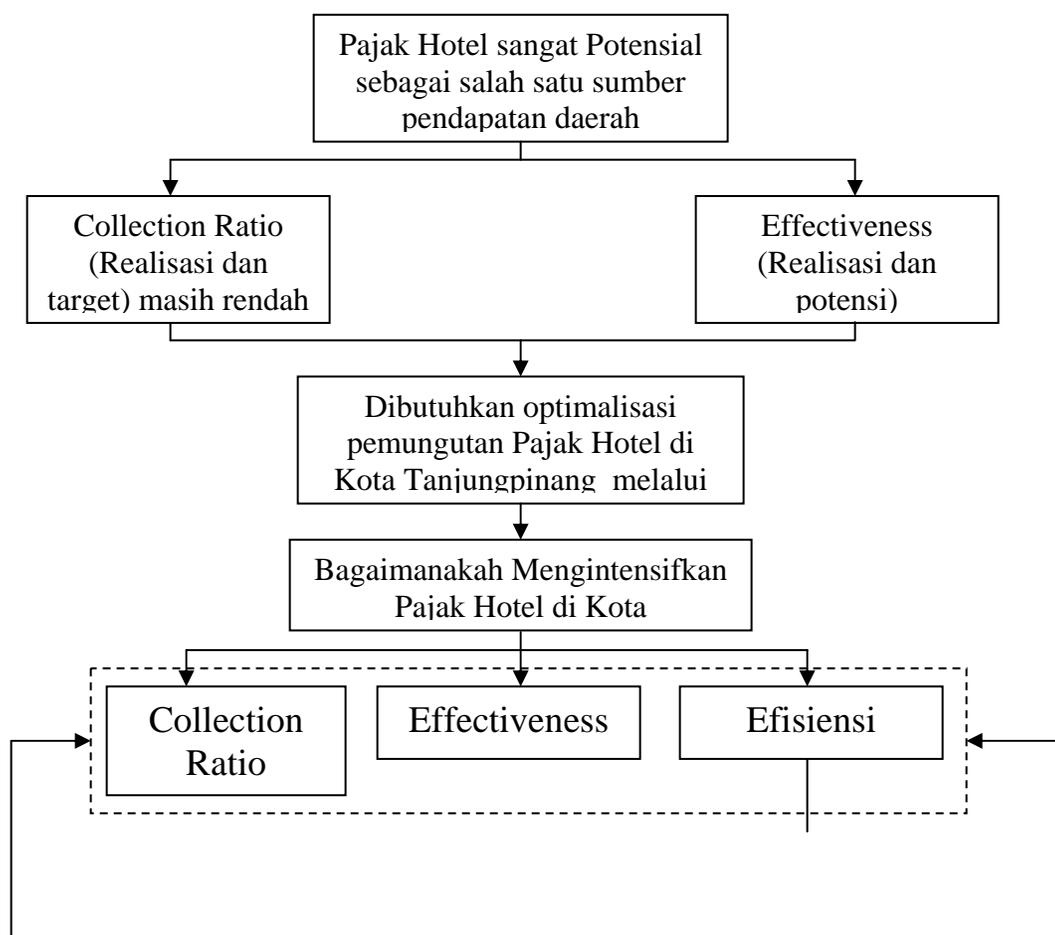
Meskipun telah terdapat beberapa penelitian membahas tentang pajak dan retribusi yang pada dasarnya bertujuan sama dalam rangka strategi peningkatan PAD masing – masing wilayah, posisi penelitian ini lebih detail yaitu dikhususkan pada pajak hotel dan tepatnya dalam rangka intensifikasi pajak hotel dengan wilayah studi di Kota Tanjungpinang

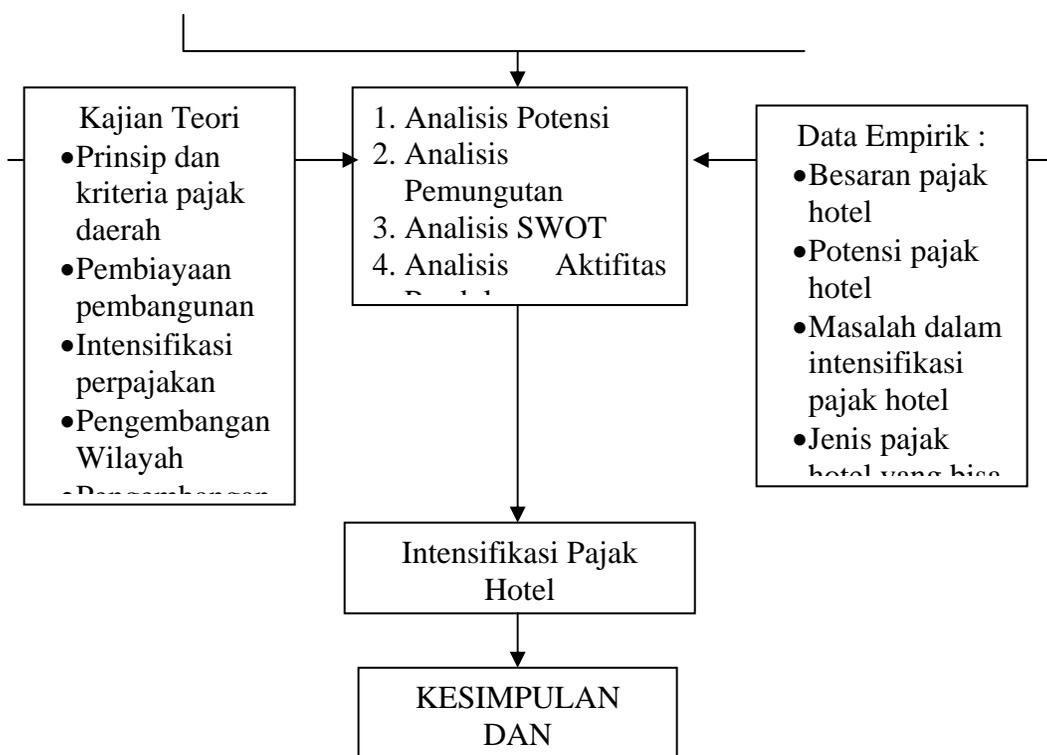
1.5 Kerangka Pemikiran

Potensi pajak hotel sangatlah potensial, khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang,. Sebagai calon ibukota propinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang memiliki lokasi yang sangat strategis, potensi pariwisata serta perdagangan dan jasa

yang ada tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, salah satunya adalah keberadaan hotel. Sampai pada akhir tahun 2003 jumlah penginapan yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 62 buah, dengan perincian 35 buah hotel dan 27 buah wisma.

Permasalahan yang muncul realisasi, target dan potensi pajak yang ada di Tanjungpinang masih sangat rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa masalah : mekanisme dan metode pemungutan yang masih kurang efektif serta keterbatasan SDM yang ada.. Sehingga dibutuhkan suatu penelitian dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah menilai kelayakan (secara normatif) pemberlakuan pajak hotel di Kota Tanjungpinang, melalui wawancara terstruktur dengan masyarakat.





GAMBAR 1.3

**KERANGKA PEMIKIRAN
STUDI INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL KOTA TANJUGPINANG**

1.6 Pendekatan Studi

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Aturan tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu maupun landasan hukum lainnya. (Rustandi dan Bachtiar, 1998 : 10) mengartikan “norma identik dengan aturan dan kaidah. Terdapat dua macam norma yaitu : norma yang mengatur peristiwa-peristiwa fisika dan norma yang mengatur tingkah laku manusia (norma – norma etika)”. Kemudian “norma yang mengatur tingkah laku manusia adalah suatu rangkaian petunjuk – petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan”. Norma ideal yang dijadikan dasar penelitian diantaranya

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Dalam studi ini juga digunakan pendekatan deskriptif analitik. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (1999 : 112) yang menyebutkan bahwa pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk “ menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”, dan analitis menurut Surakhmad (1995:12), disebutkan sebagai “tahap yang penting dan menentukan, karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian”

1.7 Metoda Penelitian

1.7.1 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pencarian langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui pengambilan data yang sudah diolah oleh suatu institusi. Untuk lebih jelasnya, kebutuhan primer dan sekunder dalam studi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA
STUDI IDENTIFIKASI PAJAK HOTEL KOTA TANJUNGPINANG

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data
1.	Besaran pajak hotel	UU dan Perda tentang pajak hotel	Sekunder	Sekretariat Pemerintah Kota Tanjungpinang

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data
		Jumlah pegawai dalam pemungutan	Sekunder	Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang dan dinas terkait
		Penerimaan pajak hotel dua tahun terakhir	Sekunder	Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang
2.	Besarnya potensi pajak hotel	Kondisi objek pajak hotel yang potensial	Primer	Lokasi dan obyek pajak hotel yang ditetapkan dalam perda
		Kondisi pengelola pajak hotel	Primer	Dispenko Tanjungpinang dan instansi terkait
		Mekanisme pemungutan pajak hotel	Primer	Dispenko Tanjungpinang dan instansi terkait
3.	Permasalahan dalam intensifikasi pajak hotel	Penerimaan pajak hotel selama tiga tahun terakhir	Sekunder	Dispenko Tanjungpinang
		Perda tentang pajak hotel	Sekunder	Sekretariat Pemerintah Kota Tanjungpinang
		Kinerja pengelola pajak hotel	Primer	Dinas dan instansi terkait
		Mekanisme pemungutan pajak hotel	Sekunder	Dinas dan instansi terkait
4.	Jenis pajak hotel yang bisa dipungut	Pajak hotel baru yang diusulkan oleh dinas	Sekunder	Dinas dan instansi terkait
		Pajak hotel yang berlaku di daerah lain	Sekunder	Data dari daerah lain
		Kaji kecocokan pajak hotel	Primer	Narasumber terpilih
		Kesepakatan pendapat para pakar	Primer	Narasumber terpilih
5.	Program rencana tindakan	Potensi riil pajak hotel	Hasil analisis	Analisis potensi pajak hotel
		Target penerimaan pajak hotel	Hasil analisis	Analisis target penerimaan pajak hotel
		Identifikasi dan perumusan masalah	Hasil analisis	Analisis masalah yang dijabarkan dalam program rencana tindak
		Rencana tindak yang diprogramkan	Hasil Analisis	Analisis SWOT

Sumber : Hasil analisis 2004

1.7.2 Teknik Sampling

Untuk meneliti upaya intensifikasi pemungutan pajak hotel, penentuan sampel menggunakan dua teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang pertama, menggunakan salah satu teknik sampling yang dikemukakan Sevilla, et.al. (1995 : 168), yaitu teknik “sampling purposive (non probability sampling)” yaitu semua anggota atau subyek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel”. Teknik ini oleh Sugiyono (1999 : 62), diartikan sebagai teknik penentuan sampel terpilih untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.

Sehingga pengambilan sampel dengan purposive sampling bisa dilakukan tanpa menggunakan rumus, karena itulah untuk kepentingan penelitian, peneliti mengambil dan memilih sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini, dengan didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu, yakni pemilihan responden didasarkan pada : pengetahuan tentang pajak hotel, pengalaman dalam mengelola bidang pemungutan pajak hotel, menjadi aktor yang terlibat serta mampu mewakili institusi tertentu terkait dengan pemungutan pajak hotel.

Teknik pengambilan sampel adalah teknik sampling aksidental. Teknik sampling aksidental menurut Sugiyono (1999 : 62) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Sampel yang diambil menggunakan teknik sampling aksidental

adalah tokoh masyarakat, yang dinilai dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini juga akan dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla,1993:163) pada penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi atau minimal 30 responden. Dengan demikian, jumlah sampel untuk jumlah hotel dan wisma sejumlah 73.

Berdasarkan penjelasan teknik sampling tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan penulis maka ditetapkan komposisi responden yang dipilih dalam studi ini adalah :

a. Responden Pemerintah

Untuk responden pemerintah menggunakan Purposive Sampling, artinya semua anggota atau subyek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sample, hanya orang yang berkompeten saja dan instansi – instansi terkait. Sebaran responden dapat dilihat pada Tabel 1.3

b. Responden Obyek Pajak Hotel

Secara umum jumlah populasi objek pajak hotel adalah 40 buah hotel, karena jumlah hotel yang tidak terlalu banyak maka akan dilakukan teknik sensus, artinya semua responden akan dijadikan sampel.

TABEL 1.3
KOMPOSISI RESPONDEN

NO	Kelompok Responden	Jml Responden
1.	Pemerintah	
	1. Bagian Ekonomi Setda Kota Tanjungpinang	2
	2. Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang	2

NO	Kelompok Responden	Jml Responden
	3. BAPPEKO Tanjungpinang 4. Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang	2
2.	Objek Pajak Hotel	40

Sumber : hasil analisis 2004

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan sebagai berikut :

- b. Teknik pengumpulan data primer, dalam studi ini dilakukan melalui observasi visual (teknik pengumpulan data melalui pengamatan lapangan). Selain observasi visual, teknik pengumpulan data primer juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan menyebarkan angket penelitian kepada obyek pajak hotel.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi dari beberapa instansi terkait. Instansi – instansi yang dapat menjadi sumber data, diantaranya adalah Kantor Sekretariat Kota Tanjungpinang, Kantor Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang dan instansi terkait lainnya. Data sekunder juga diperoleh dari hasil penelitian yang relevan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam studi ini diarahkan sebagai tindak lanjut setelah tahap pengumpulan data untuk memperoleh output studi yang diharapkan. Teknik analisis yang digunakan adalah :

1. Kelayakan Normatif, yaitu analisis berdasarkan suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Aturan tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh

instansi tertentu maupun landasan hukum atau lainnya. Analisis normatif digunakan untuk analisis intensifikasi pajak hotel. Analisis intensifikasi berdasarkan Undang – Undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 ayat 2, dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, pasal 1. Analisis yang digunakan berupa penilaian para responden bertujuan untuk mengetahui pendapat mengenai usaha peningkatan penerimaan pajak hotel melalui usaha intensifikasi. Pendekatan yang digunakan merupakan perpaduan antara pendekatan empiris, dengan pendekatan yang diperoleh dari sudut pandang responden mengenai usulan tentang optimalisasi penerimaan pajak hotel yang bisa dikembangkan di Kota Tanjungpinang. Input dari penilaian responden adalah semua jenis pajak hotel yang diperoleh dari nara sumber melalui wawancara dan penyebaran angket maupun studi literatur tentang pengalaman pelaksanaan pajak hotel sebelum diberlakukannya Undang – Undang nomor 18 tahun 1997 (Undang – Undang nomor 11 tahun 1957). Dari input tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kriteria tentang pemungutan pajak hotel. Output analisis adalah berupa kesimpulan mengenai pajak hotel yang diterapkan di Kota Tanjungpinang.

2. Analisa Aktifitas Pendukung Peningkatan Pajak Hotel untuk menentukan dan menganalisis evaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tuntutan kerangka acuan kerja. Analisis yang digunakan untuk menggali aspek – aspek kondisi yang direncanakan untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi di dalam kinerja pengelolaan dan pengembangan pajak hotel. Analisis kualitatif pada studi ini menggunakan tolok

ukur berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas, prinsip *ability to pay*, dan prinsip keadilan yang merupakan prinsip dalam pengenaan pajak hotel.

3. Analisa SWOT untuk menentukan dan menganalisis evaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tuntutan kerangka acuan kerja. Analisis yang digunakan untuk menggali aspek – aspek kondisi yang direncanakan untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi di dalam kinerja pengelolaan dan pengembangan pajak hotel
4. Perhitungan potensi, merupakan metode untuk menghitung seberapa besar potensi pajak hotel yang dapat dipungut, apabila dari potensi yang ada tetapi belum ditetapkan dan dipungut sebagai pajak hotel.

1.8 Sistematika Penulisan

Kajian ini memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup substansi dan wilayah, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab II Intensifikasi Pajak Hotel

Hal-hal yang dibahas adalah tentang pengertian pajak, prinsip dan kriteria perpajakan daerah, ketentuan mengenai pungutan pajak daerah dan retribusi daerah peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung

pembiayaan daerah optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan fungsi pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan pajak

Bab III Kajian Umum dan Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang

Bab ini berisi gambaran singkat wilayah Kota Tanjungpinang serta karakteristik kependudukan dan perekonomian di Kota Tanjungpinang.

Bab IV Analisa Intensifikasi Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang

Dalam bab ini akan diuraikan proses analisis yang dilakukan yaitu, analisis potensi pajak hotel di Kota Tanjungpinang, analisis pemungutan pajak serta analisis aktifitas pendukung peningkatan pajak hotel.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penyusunan thesis ini, berisi temuan studi, kesimpulan dan rekomendasi lanjutan.

BAB II

INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL

Pelaksanaan UU No.32 dan 33 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari

Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Walaupun baru satu tahun diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan

ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

2.1 Pengertian Pajak Hotel

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai istilah pajak, dapat ditelaah dari pendapat pakar di bidang perpajakan. Menurut Soemitro, (1997 : 7) bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang wajib dilakukan berdasarkan Undang – Undang atau peraturan, sehingga pajak dapat dipaksakan tanpa balas jasa secara langsung. Tujuan pemungutan pajak adalah agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi tugasnya menjalankan pemerintahan.

Sesuai dengan definisi pajak tersebut maka Suparmoko (1996 : 94) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah seperti dijelaskan oleh Bawazier (1998 :2) bahwa :

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya. Hasil pajak daerah adalah pungutan pajak asli daerah dan pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pengertian pajak daerah dalam pasal 1 Undang – Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan sebagai berikut :

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang tertuang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pemungutan pajak daerah adalah rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

2.2 Pengelolaan Pajak Hotel

Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk rumah

kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry dll.
- Fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel yang dapat berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/ pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya. Besaran pajak yang dibebankan adalah 10% dari tariff bersih yang dibebankan kepada pelanggan.

2.3 Prinsip Dan Kriteria Perpajakan Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

- Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- 2) Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “*mobile*”. Pajak daerah yang sangat “*mobile*” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “*mobile*” akan mempermudah

daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

- 3) Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- 4) Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- 5) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- 6) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- 7) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
- 8) Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya

kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

2.4 Ketentuan Mengenai Pungutan Pajak Daerah.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan dengan PP. Sehingga pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak, yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP). Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001.

Selanjutnya mengenai jenis obyek pajak daerah, dalam pasal 2 ayat 2 Undang – Undang nomor 34 tahun 2000 secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Jenis pajak daerah Kabupaten / Kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain terdiri atas :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

Selain ketujuh jenis Pajak Daerah sebagaimana disebutkan di atas, melalui Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dapat menetapkan jenis – jenis pajak daerah lainnya, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 4 Undang – Undang nomor 34 tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

- Bersifat pajak dan bukan retribusi
- Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat
- Potensinya memadai
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- Menjaga kelestarian lingkungan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah adalah sebagai salah satu sumber utama bagi penerimaan pemerintah daerah, dimana jumlah dan jenis obyeknya dapat digali dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah yang bersangkutan, sepanjang dapat memenuhi kriteria seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang – Undang nomor 34 tahun 2000.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang

dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999.

2.5 Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi

daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI4 bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

- *Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah*

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan *manuver* keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

- *Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah*

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

- *Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah*

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buoyancy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan

daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

- *Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah*

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem penarikan pajak di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah

penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah). Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlalu "sentralistis".

2.6 Optimalisasi Pungutan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

2.6.1 Intensifikasi Pajak

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup

banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

- *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

- *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

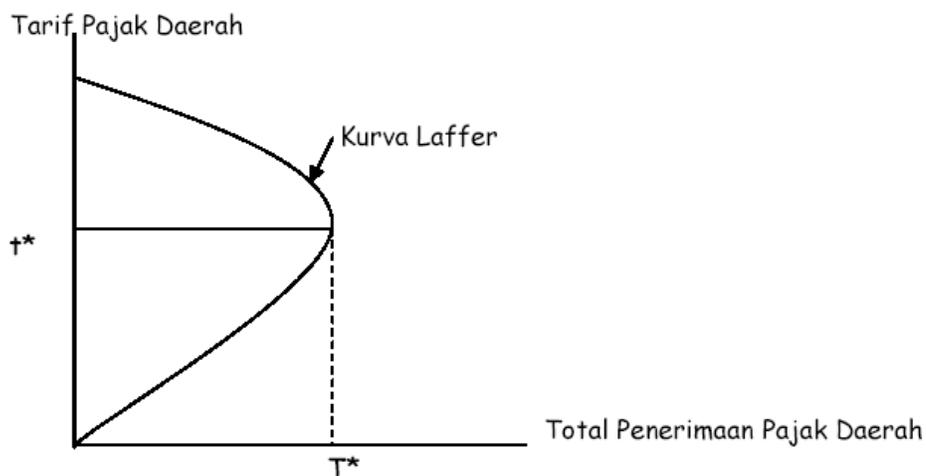
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2.6.2 Model Leviathan

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu : (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah Daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.

Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceteris-paribus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka Gambar 1.1 di bawah menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva ("*Laffer*") yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari wajib pajak.

Gambar-1 : Model Leviathan



Gambar tersebut juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T^*) pada tarif t^* . Pada tarif t^* , menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*.

Model Leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal.

2.7 Fungsi Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas dan prasarana kota, semakin menuntut sikap inovatif Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagaimana disimpulkan oleh Gaebler (1994) dalam teori *reinventing government*, bahwa semangat yang terkandung dalam pengelolaan institusi pemerintahan kota sebagai *public enterprenurial management* diharapkan dapat menyerap ke seluruh unsur organisasi agar memiliki pandangan *profit center* dan *enterprises budgets*, dimana potensi keuangan bagi pembangunan digali secara optimal dari masyarakat yang dilayani dengan memungut retribusi atas *public services* yang diberikan pemerintah. Semangat demikian harus ditunjukkan melalui upaya – upaya pembangunan sarna dan prasarana kota. Yakni jika dilihat dari aspek finansial setiap upaya pembangunan kota harus mempertimbangkan secara komprehensif terhadap mekanisme *cost recovery* dan *cross subsidy*.

Pelimpahan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk memacu peningkatan pelayanan publik, pada dasarnya sejalan dengan tuntutan perkembangan kota agar pemerintahan kota semakin mandiri, serta tidak lagi tergantung pada bantuan pusat. Dengan landasan pemikiran ini, maka aparatur pemerintah daerah perlu bersikap imajinatif dan kreatif dalam melaksanakan segenap tugas dan fungsinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Steve Leach, John Stewart dan Kieran Walsh (1994 : 30) yang menyatakan bahwa : pemerintah daerah tidak dibatasi dalam pandangan yang sempit mengenai serangkaian pelayanan terhadap masyarakat setempat, serta jangan dianggap bahwa segala bentuk pelayanan itu tidak penting, karena mencakup keseluruhan bidang sosial ekonomi, termasuk perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat.

Untuk alasan itu, segala kebijakan ditujukan guna meningkatkan mutu kehidupan setiap individu masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan segenap jajaran unsur organisasi di lingkungan pemerintah daerah, agar berupaya mengembangkan pendekatan kerjasama.

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1994) dalam *Reinventing Government* membahas mengenai *empowering* atas pelaksanaan berbagai bentuk pelayanan publik. Kebijaksanaan yang menopang misi pemerintah yang dilandasi pemikiran *Reinventing Government* berarti mengandung pengertian perlunya deregulasi melalui transformasi *rule* yang melandasi peran serta masyarakat perkotaan secara aktif dalam membayar pelayanan – pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kota, yang antara lain dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hotel menuntut adanya konsistensi penerapan prosedur secara efektif dan efisien. Karena itu diperlukan adanya pengawasan yang mantap terhadap kegiatan operasional pemungutan pajak hotel. Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hotel adalah karena pada dasarnya di dalam setiap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sangat jarang berjalan persis sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga penyimpangan dan kesalahan mungkin saja dapat terjadi, untuk mencegah penyimpangan itu maka diperlukan pengawasan yang efektif.

Karena itu pentingnya pengawasan menurut Anthony (1992 : 2) bahwa : *controlling is the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization's effective.*

Demikian pula Rosenblatt (1993 : 393) menjelaskan bahwa : *controlling is process of checking on plans and correcting deviations from the plotted course, that is continuous*

activity. Sedangkan Scanlan dan Keys (1969 : 158) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang terdiri atas tiga langkah penting yaitu :

1. *Measuring the output of the systems*
2. *Comparing these outputs with plans and ascertaining the deviations, if any*
3. *Correcting unfavorable deviations by taking corrective action, it is stressed here, that for the manager to take corrective action, it is assumed that he or she has power to modify or change some inputs a very important assumption.*

Implikasi dari penjelasan itu adalah bahwa segala bentuk upaya dalam melakukan intensifikasi atas pemungutan pajak, khususnya yang dilakukan dalam pajak hotel di Kota Tanjungpinang terhadap perseorangan maupun badan hukum, yang berlandaskan pada Peraturan Daerah yang ada adalah sebagai upaya peningkatan kontribusi dari sumber pajak terutama pajak hotel bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya diharapkan dapat memperbesar kemampuan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya membiayai penyelenggaraan pemerintah.

2.8 Pengembangan Pariwisata

Pengelolaan suatu obyek wisata harus dilakukan dengan profesional, apalagi Indonesia mengedepankan sektor pariwisata sebagai andalan dan dinilai sebagai sektor yang paling siap membantu proses pemulihan krisis ekonomi nasional. Namun kenyataannya tidak sedikit pengelolaan obyek wisata yang terkesan dan terasa kurang profesional. Untuk tolok ukur lahiriah saja bisa dilihat dengan penataan kawasan, koordinasi pungutan, penanganan masalah kebersihan dan obyek pendukungnya. Beberapa alasan dimunculkan bila masalah profesionalisme ini dipertanyakan,

diantaranya alasan keterbatasan dana. Uang masuk dan tiket habis untuk menggaji karyawan dan tidak ada atau walaupun ada cuma sekadarnya yang bisa dialokasikan untuk pemeliharaan sarana obyek. Apalagi untuk mengembangkannya. (Sugiantoro, R. 2000.39)

Dunia pariwisata merupakan satu industri yang kompleks, maka organisasi-organisasi pariwisata nasional harus ditata, diorganisasi dan dijalankan menurut konsep-konsep manajemen dan pemasaran ilmiah modern sehingga diharapkan pertumbuhan pariwisata akan meningkat.

Dalam industri pariwisata, pemasaran sebagai salah satu alat manajemen memegang peranan yang penting karena akan membantu organisasi maupun badan usaha pariwisata untuk menetapkan suatu sistem komunikasi yang efektif dan konsisten dengan para wisatawan yang real maupun potensial dan berusaha mengetahui keinginan, kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai supaya mampu memenuhi persyaratan-persyaratan wisata sebaik-baiknya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Salah Wahab (2003.148) konsep pemasaran dalam sistem pariwisata mempunyai 4 fungsi, yaitu :

- 1. Pembatasan pengertian pasaran, baik yang real maupun yang potensial dan suatu studi yang mendalam mengenai susunan pasaran dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya.**
- 2. Komunikasi, untuk memikat permintaan dengan cara menyakinkan wisatawan bahwa daerah tujuan wisata yang tersedia dengan daya tarik, fasilitas dan jasa-jasanya akan memenuhi selera mereka lebih besar dari**

daerah tujuan wisata lain dan karena itu patutlah didahulukan dari suatu produksi pengganti lainnya.

- 3. Umpan balik, mengenai produksi membantu mengembangkan dan memperbaikinya untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan dan dianalisis.**
- 4. Pengawasan hasilnya, untuk menilai, menghitung dan mengukur hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh. Sistem pengawasan demikian itu harus mencapai sasaran dayaguna sumber-sumber wisata dan meningkatkan hasil penjualan.**

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut, atau juga pengembangan pariwisata selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat setempat. Menurut Yoeti (1997:34) pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan alasan alasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan pariwisata disebabkan dengan masalah ekonomi

Dengan dikembangkannya obyek wisata pada suatu daerah secara langsung dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk setempat. Penduduk setempat dapat bekerja sebagai tenaga kerja dan fasilitas pendukung yang akan muncul didaerah sekitarnya. Dan dengan adanya wisatawan yang datang secara tidak langsung akan timbul permintaan akan hasil kerajinan, perkebunan dan lain-lain dan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan keuangan daerah.

- b. Pengembangan pariwisata bersifat non ekonomis

Wisatawan yang datang akan melihat atraksi wisata yang ada seperti museum, bangunan kuno bersejarah. Dengan demikian akan timbul hasrat dan keinginan untuk memelihara aset wisata yang ada. Semuanya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan dan perawatannya. Dengan pengembangan pariwisata diharapkan terjadi kemajuan pariwisata sebagai suatu industri dan akhirnya dari hasil kegiatan kepariwisataan tadi diperoleh biaya untuk memelihara obyek wisata.

- c. Dengan adanya pengembangan pariwisata, diharapkan terjadi interaksi yang positif antara wisatawan yang datang dengan penduduk setempat. Perbedaan pendukung dan penafsiran serta salah pengertian akan dapat dihilangkan melalui kegiatan pariwisata.

Menurut Soekadijo (1996:10) tujuan pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor, antara lain :

1. Mengubah atau menciptakan usaha-usaha baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya: usaha transportasi, akomodasi.
2. Memperluas pasar barang-barang lokal
3. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru.
4. Mempercepat sirkulasi ekonomi dalam usaha negara kunjungan dengan demikian akan memperbesar *multiplier effect*.

Pengembangan kawasan sebagai tujuan wisata menurut Kaiser Helbert, (1978:81) dalam tingkat perencanaan pariwisata daerah mencakup pembangunan fisik obyek dan atraksi wisata yang akan dijual, fasilitas akomodasi, restoran, pelayanan umum, angkutan wisata dan perencanaan promosi yang akan dilakukan. Sedangkan

tahap-tahap selanjutnya akan banyak bergantung pada kondisi daerah tujuan wisata tersebut, bila ternyata meningkat atau banyak pengunjung, perlu dipikirkan pengembangan selanjutnya dengan sistem prioritas. Artinya pengembangan akan mendahulukan sesuai dengan permintaan pasar.

Pariwisata pada intinya adalah merupakan penawaran dan permintaan dari komponen-komponen pariwisata sedangkan pengembangan pariwisata adalah pengembangan atraksi wisata sebagai daya tarik utama. Keaslian dan kekhasan atraksi yang disuguhkan haruslah dipertahankan sehingga wisatawan merasa puas melihat dan menyaksikan hanya diobyek wisata tersebut. Oleh sebab itu obyek dan atraksi wisata haruslah memiliki *style* yang berbeda dari yang lain dan bisa memuaskan wisatawan.

2.9 Intensifikasi Pajak Hotel

Pelaksanaan otonomi daerah yang berimplikasi pula pada peningkatan tingkat kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah sangatlah diperlukan, baik berupa optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kota bahwa kebijaksanaan di bidang Keuangan Daerah, ditujukan kepada peningkatan peranan potensi Daerah menjadi kekuatan inti dalam proses pembangunan daerah. Terlaksananya efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah serta mantapnya Manajemen Keuangan Daerah dalam arti :

4. Peningkatan potensi daerah menjadi potensi riil dalam proses pembangunan daerah, yang dampaknya diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin berkembang.

5. Pengupayaan terwujudnya efisiensi pembiayaan terutama yang bertalian dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah melalui peningkatan disiplin anggaran dalam rangka penghematan pengeluaran daerah.
6. Pemantapan manajemen keuangan daerah melalui peningkatan mutu kemampuan aparatur serta menyempurnakan organisasi dan tata kerjanya, dengan upaya menyediakan sarana yang diperlukan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai upaya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti usaha intensifikasi serta penggunaan sistem dan metode kerja yang tepat dengan diimbangi upaya penyediaan tenaga yang cukup memadai, baik mutu maupun jumlahnya.

. Membahas perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD tidak hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau tahun pajak berjalan, tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak hotel dan restoran itu sendiri. Penetapan target dan strategi dalam merealisasikannya harus lebih rasional dan operasional, artinya pemerintah harus dapat melihat kemampuan dari objek pajak, karena kondisi ini akan menyangkut kemampuan mereka dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Peningkatan realisasi penerimaan dapat diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi baik melalui proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakan peraturan dan pengawasan serta perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan. Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya yang ada di Din sebagai pengelola pajak hotel, baik sumber daya manusianya, maupun fasilitas pendukung kegiatannya.

TABEL II.1
RANGKUMAN TEORI

No.	Dasar Teori	Variabel
1.	Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang wajib dilakukan berdasarkan Undang – Undang atau peraturan, sehingga pajak dapat dipaksakan tanpa balas jasa secara langsung. Tujuan pemungutan pajak adalah agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi tugasnya menjalankan pemerintahan (Soemitro, 1997 : 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran Pakal Hotel • Potensi Pajak Hotel • Intesifikasi pajak Hotel • Jenis Pajak Hotel • Rencana Tindak
2.	Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “ <i>mobile</i> ”. Pajak daerah yang sangat “ <i>mobile</i> ” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah (Teresa Ter-Minassian,1997)	
3.	Pajak daerah seharusnya “ <i>visible</i> ”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah (Teresa Ter-Minassian,1997)	
4.	bahwa semangat yang terkandung dalam pengelolaan institusi pemerintahan kota sebagai <i>public enterprenurial management</i> diharapkan dapat menyerap ke seluruh unsur organisasi agar memiliki pandangan <i>profit center</i> dan <i>enterprises budgets</i> , dimana potensi keuangan bagi pembangunan digali secara optimal dari masyarakat yang dilayani dengan memungut retribusi atas <i>public services</i> yang diberikan pemerintah (Gaebler, 1994)	
5	<i>Reinventing Government</i> berarti mengandung pengertian perlunya deregulasi melalui transformasi <i>rule</i> yang melandasi peran serta masyarakat perkotaan secara aktif dalam membayar pelayanan – pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kota, yang antara lain dalam bentuk pajak dan retribusi daerah (Gaebler, 1994)	

Sumber : hasil analisis, 2005

BAB III

KAJIAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DAN PAJAK HOTEL KOTA TANJUNGPINANG

3.1 Kajian Umum Kota Tanjungpinang

3.1.1 Aspek Perkembangan Kota

Dalam perkembangan sebuah kota sangat dipengaruhi oleh banyak aspek yang berada di dalam maupun di luar kota tersebut, meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik alam, politik, dan lain sebagainya. Semua aspek tersebut saling berkait satu sama lain sehingga memberikan terhadap kota tersebut. Kota Tanjungpinang sebagai sebuah kota yang masih baru juga tidak dapat lepas dari aspek tersebut. Sebagai gambaran mengenai berbagai aspek yang ada dalam perkembangan Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari pola pemanfaatan lahan yang ada pada saat sekarang di Kota Tanjungpinang serta sumber daya yang mendukungnya.

A. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam / lahan dengan manusia dengan kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan di Kota Tanjungpinang umumnya didominasi oleh lahan bekas pertambangan, belukar, perkebunan dan permukiman.

Areal hutan di Kota Tanjungpinang terdiri atas hutan lindung yang terdapat di Bukit Kucing yang terletak di pusat Kota Tanjungpinang dan sekitar danaun Sungai

Pulau sebagai areal tangkapan air danau tersebut. Sedangkan hutan lainnya yang statusnya sebagai hutan konservasi terdapat di Pulau Dompok. Untuk areal perkebunan dan pertanian tanaman pangan tidak tercatat adanya produksi yang dijual ke luar wilayah Kota Tanjungpinang.

B. Pertambangan

Potensi bahan galian C di Kota Tanjungpinang adalah Bauksit tetapi pada saat ini penambangannya sebagian besar sudah tidak aktif. Pertambangan biji bauksit yang masih beroperasi hanya di Pulau Dompok dan hasil dari kegiatan pertambangan tersebut produksinya di ekspor ke Sumatera Utara untuk diproses menjadi alumina sebagai bahan baku pabrik aluminium di Asahan (Sumatra Utara). Selain bahan tambang bauksit juga terdapat bahan tambang granit.

C. Industri

Perusahaan industri besar / sedang di Kota Tanjungpinang tahun 2001 berjumlah 23 perusahaan dengan tenaga kerja yang terserap berjumlah 3676 orang. Ditinjau dari perkembangan antara tahun 1998 – 2000, antara tahun 1998-1999, jumlah industri tetap, yaitu 21 perusahaan, tetapi tenaga kerja yang terserap meningkat. Pada tahun 1998 terserap 2915 orang tenaga kerja, tahun 1999 terserap 3499 orang dan tahun 2000 telah terserap 3618 orang. Perusahaan industri kecil baik formal maupun non formal yang terdata tahun 2000 di Departemen Perindustrian berjumlah 100 perusahaan dengan tenaga yang dapat terserap sejumlah 609 orang. Industri kecil ini sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang tersebar di pemukiman penduduk kota.

Selain beberapa sumber daya tersebut yang berada di daratan maka juga terdapat sumber daya laut yang cukup potensial dimiliki oleh Kota Tanjungpinang. Pemanfaatan perairan dan laut di Kota Tanjungpinang, secara umum meliputi kegiatan perikanan, dan

transportasi barang dan penumpang. Hingga saat ini penggunaan perairan yang paling strategis adalah sebagai sarana penghubung antar pulau dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Tanjungpinang dapat dibagi atas penangkapan ikan antar pulau / laut lepas dan kegiatan budidaya ikan.

Kegiatan pembudidayaan ikan masih sangat sedikit dilakukan oleh penduduk Kota Tanjungpinang. Untuk pembesaran dan penampungan ikan dari alam yang paling banyak dilakukan diantaranya adalah ikan kerapu dan kakap merah. Usaha untuk mencapai lokasi pembudidayaan di Kota Tanjungpinang terdapat di Kelurahan Dompok. Potensi kelautan dari budidaya laut dari ikan seperti kerapu sebenarnya sudah memiliki pangsa pasar yang baik.

3.1.2 Aspek Perwilayahan dan Administratif

Secara geografis Kota Tanjungpinang mempunyai kedudukan yang cukup strategis baik dari segi ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun sosial budaya. Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di bagian selatan pulau tersebut dengan menghadap ke arah Barat Daya pada $0^{\circ} 50' 54,62''$ LU dan $104^{\circ} 20' 23,40''$ BT – $104^{\circ} 32' 49,9''$ BT.

Batas wilayah perencanaan secara administrasi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bintan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karas, Kecamatan Galang Kota Batam.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Kota Tanjungpinang dan orientasi wilayah perencanaan dapat dilihat pada peta.

Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri atas daratan / pulau dan lautan sehingga dapat dikategorikan menjadi dua kategori wilayah yaitu Tanjungpinang Daratan dan Tanjungpinang Lautan. Yang termasuk sebagai Tanjungpinang Daratan adalah wilayah kota yang menjadi bagian langsung dari Pulau Bintan, sedangkan Tanjungpinang Lautan meliputi pulau-pulau di luar Pulau Bintan yang masih termasuk dalam wilayah Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan, 18 kelurahan dengan luas wilayah adalah 239,5 Km², yang antara lain:

TABEL III.1
NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG
DAN LUAS WILAYAHNYA TAHUN 2003

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
I.	Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari :	34,50
	1. Kelurahan Tanjungpinang Barat	11,00
	2. Kelurahan Kemboja	7,00
	3. Kelurahan Kampung Baru	6,50
	4. Kelurahan Bukit Cermin	10,00
II.	Kecamatan Tanjungpinang Kota terdiri dari :	52,50
	1. Kelurahan Tanjungpinang Kota	1,50
	2. Desa Penyengat	4,00
	3. Desa Kampung Bugis	24,00
	4. Desa Senggarang	23,00
III.	Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari :	69,00
	1. Kelurahan Tanjungpinang Timur	7,00
	2. Kelurahan Tanjung Unggat	10,50
	3. Kelurahan Tanjungayun Sakti	10,50
	4. Kelurahan Dompok	30,50
	5. Kelurahan Sei jang	10,50

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
IV.	Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari ;	83,50
	Kelurahan Kampung Bulang	11,50
	Kelurahan Melayu Kota Piring	12,00
	Kelurahan Air Raja	12,00
	Kelurahan Pinang Kencana	15,00
	Kelurahan Batu Sembilan	23,00
Total Luas Wilayah Kota Tanjungpinang		239,50

Sumber : Kota Tanjungpinang dalam Angka, 2003

3.2 Kajian Sosial Kependudukan, Budaya dan Pariwisata

Tinjauan terhadap aspek kependudukan dalam lingkup Kota Tanjungpinang yang meliputi empat kecamatan yaitu kecamatan Tanjungpinang Kota, kecamatan Tanjungpinang Barat, kecamatan Tanjungpinang Timur, kecamatan Bukit Bestari. Tinjauan kependudukan dan sosial budaya di Kota Tanjungpinang pembahasannya meliputi jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut kelompok umur, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, komposisi penduduk menurut mata pencaharian, komposisi penduduk menurut agama dan kondisi sosial budaya lainnya.

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan Kota Tanjungpinang, keberadaan penduduk perlu dianalisis kecenderungannya yang dilakukan sebagai salah satu dasar perencanaan tata ruang, topik bahasan analisis kependudukan mencakup perkiraan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang, sebaran penduduk struktur penduduk, serta migrasi penduduk.

3.2.1 Jumlah, Kepadatan, Sebaran Penduduk Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data tahun 2003 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan sebesar 144.023 jiwa yang meliputi jumlah penduduk kecamatan

Tanjungpinang Kota 22.429 jiwa, kecamatan Bukit Bestari 47.212 jiwa, kecamatan Tanjungpinang Timur 19.577 jiwa dan kecamatan Tanjungpinang Barat 54.804 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di kota Tanjungpinang pada tahun 2002 adalah 601 jiwa per Km². Untuk lebih jelasnya lihat Tabel III.2 dan Tabel III.3.

**TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah (Jiwa)
1	Tanjungpinang Timur	19.577
2	Tanjungpinang Barat	54.804
3	Tanjungpinang Kota	22.429
4	Bukit Bestari	47.212
Jumlah Keseluruhan		144.023

Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2003

**TABEL III.3
KEPADATAN PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003**

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH 2001 (jiwa)	KEPADATAN 2001 jiwa/km ²
1	Tanjungpinang Timur	83,5	19.577	234
2	Tanjungpinang Barat	34,5	54.804	1.589
3	Tanjungpinang Kota	52,5	22.429	427
4	Bukit Bestari	69,0	47.212	684
		239,5	144.023	601

Sumber : Tanjungpinang dalam Angka Tahun 2003

Perkembangan penduduk sangat dipengaruhi oleh dua aspek pengaruh yaitu karakteristik penduduk dan fungsi ruang. Dari sudut karakteristik penduduk, perkembangan penduduk mempunyai keterkaitan dengan tingkat fertilitas, mortalitas, serta migrasi (baik datang maupun pergi) penduduk. Dari sudut fungsi ruang

perkembangan penduduk terjadi berbanding lurus dengan fungsi ruang yang akan menjadi alasan penduduk untuk datang atau meninggalkan kota yang bersangkutan.

Dari data perkembangan penduduk terlihat bahwa perkembangan penduduk di Kota Tanjungpinang selain dipengaruhi oleh selisih tingkat fertilitas dengan mortalitas, juga erat kaitannya dengan fungsi Kota Tanjungpinang sebagai Kota perdagangan dan jasa, pelabuhan, pariwisata, industri dan pertambangan. Atas fungsi tersebut telah menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai daya tarik penduduk untuk melakukan migrasi.

Karakteristik penduduk serta fungsi ruang Kota Tanjungpinang telah membentuk perkembangan penduduk yang dalam periode 1990-2003 senantiasa bertambah. Dengan data perkembangan penduduk yang ada akan menjadi dasar bagi proyeksi jumlah penduduk pada masa yang akan datang.

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2003 adalah 144.023 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang memperlihatkan karakteristik yang berbeda, sehingga dalam memproyeksikan jumlah penduduk untuk masa yang akan datang dapat didasarkan pada sebuah metode proyeksi yang dianggap sesuai. Penggunaan metode proyeksi guna penaksiran jumlah penduduk tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik data masa lampau, kecenderungan pertumbuhan pada masa yang akan datang dan kebijaksanaan yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3.2.2 Potensi Budaya dan Pariwisata

Masyarakat yang tinggal di Kota Tanjungpinang terdiri dari percampuran/persekutuan suku-suku bangsa dan golongan etnik seperti dari golongan asli setempat Melayu, Tionghoa, Jawa, Minang, Bugis (Sulawesi) dan dari daerah lainnya di Sumatera dan berbagai suku bangsa Indonesia lainnya. Keragaman struktur masyarakat tersebut yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang telah lama dan masing-masing mempunyai identitas sosial budayanya yang umumnya telah terpengaruh oleh berbagai unsur budaya Islam (dominan), Budha dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang bersumber dari masa lampau. Sehingga pluralisme sudah menjadi ciri utama kebudayaan masyarakat Kota Tanjungpinang.

Dilihat berdasarkan fungsi keterkaitan antar variabel jenis etnis, agama dan mata pencaharian penduduk (dominan buruh, pedagang dan lain-lain) menunjukkan keterkaitannya sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan sosial budaya kemasyarakatan penduduk di Kota Tanjungpinang sangat kompak atau tingkat gotong royongnya masih cukup tinggi.

Selain hal tersebut di atas, dilihat dari pola permukimannya yang dominan mengelompok, mengindikasikan bahwa hubungan sosial sangat akrab walaupun dengan dominasi etnis tertentu. Disamping itu terlihat pula adanya segmentasi sejajar antara masyarakat menurut agama atau kepercayaan, yang dominan Islam dan Budha. Kemudian hubungan kekerabatan/keluarga berdasarkan kesamaan daerah asal banyak mewarnai pola perilaku sosial kemasyarakatan.

Sebagian penduduk Kota Tanjungpinang merupakan penduduk kepulauan, yang hidupnya banyak diwarnai oleh tata kelautan, seperti musim angin, musim ikan, daya jangkau laut antar pulau. Hal ini sangat mempengaruhi pola

kehidupan yang dinamis, sisi positif dari ciri masyarakat demikian adalah mekanisme gerak keluarnya relatif lebih dominan, dan gerak kedalam kurang. Selain pola kultur masyarakat seperti itu sangat berbeda dengan masyarakat pegunungan atau pedataran. Pola masyarakat demikian lebih terbuka dan bergerak melintang atau centrifugal, sedang sebaliknya pola masyarakat pedataran lebih cenderung gerakannya memusat atau centripetal. Segi negatifnya masyarakat pelaut ini kurang memiliki tempat atau *base* yang kuat karena perjalannya yang membutuhkan waktu mingguan bahkan bulanan.

Sehingga sangat sedikit waktu untuk keluarga, maka status penjenjangan dalam keluarga relatif tipis, dan juga mewarnai pola status sosial yang kurang menjadi perhatian. Namun didukung faktor sosial lainnya yang cukup solid, seperti agama, komuni/kekerabatan, dan kesamaan kondisinya, faktor negatifnya dapat diperkecil.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka masyarakat Kota Tanjungpinang merupakan masyarakat yang terbuka dan mampu menerima perubahan sosial budaya sejalan dengan perkembangan jaman, serta dapat kerja sama dengan prinsip kesejajaran terhadap masuknya pendatang (investor) termasuk tenaga kerja antar daerah, sepanjang hal tersebut memberikan peluang dan kesempatan untuk peningkatan perekonomiannya.

Dilihat dari keberadaan potensi objek wisata, Kota Tanjungpinang memiliki potensi pengembangan wisata budaya dan bahari (alam). Persebaran obyek wisata alam (bahari) hampir di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang (kecuali pusat kota) dan namun demikian untuk mendukung pengembangan potensi ini upaya perlindungan melalui penetapan kawasan cagar alam belum dilakukan. Wisata budaya di Tanjungpinang

memiliki Pulau Penyengat, Ulu Riau yang didalamnya terdapat Pusat Kerajaan Ulu Ringga, Istana Kota Piring, Makam Daeng Marewa dan Daeng Celak. Begitu pula keberadaan Senggarang dengan Klenteng Tua yang sering dikunjungi rombongan wisatawan etnis china tidak hanya dari wilayah lain di Indonesia tapi juga wisatawan dari Singapura dan Malaysia, wisata alam Pulau Sore, Pulau Terkulai dan rencana wisata alam di Pulau Dompok. Pengembangan pariwisata alam dan budaya ditujukan pada objek wisata yang memiliki tingkat keunikan yang tinggi, atau setidaknya paling tinggi dari objek-objek wisata dengan daya tarik serupa

3.3 Kajian Perekonomian

Kota Administratif Tanjungpinang yang secara hirarkis berada dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Riau, berdasarkan UURI No. 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 berubah status menjadi Kota Tanjungpinang yang memiliki pemerintahan sendiri. Kota ini memiliki potensi perdagangan, industri, jasa dan wisata, serta merupakan kota yang menjadi salah satu basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura-Growth Triangle) dan AFTA.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Kota Tanjungpinang diharapkan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dan kota itu sendiri pada khususnya, yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pembangunan bidang ekonomi Kota Tanjungpinang dititikberatkan pada tiga sektor unggulan yaitu perdagangan, industri jasa dan transportasi. Ketiga sektor tersebut diharapkan merangsang perkembangan dan pertumbuhan sektor – sektor ekonomi yang lain.

Struktur ekonomi di suatu daerah ditentukan oleh peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka makin besar peranan sektor bersangkutan dalam perekonomian daerah tersebut. Perekonomian di Kota Tanjungpinang mulai terasa hidup setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi. Krisis ekonomi membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, tak beda pula dengan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Ketika dilanda krisis ekonomi banyak usaha-usaha di Kota Tanjungpinang yang terkena dampaknya seperti banyaknya industri yang gulungtikar akibat dilanda krisis ekonomi ini. Namun dilain pihak di Kota Tanjungpinang ini ketika krisis ekonomi mulai menghancurkan sektor-sektor formal, sektor informal justru mulai hidup dan berkembang. Pasca krisis ekonomi ini sektor-sektor ekonomi informal tampak mulai berkembang terutama pada bidang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti misalnya jasa ojek, warung-warung kecil yang menjual kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Selain itu pasca krisis ekonomi, jumlah pendatang yang masuk ke Kota Tanjungpinang semakin meningkat terutama pendatang asing (wisman). Dengan kata lain sektor pariwisata dan pendukungnya mulai meningkat pasca krisis ekonomi di Kota Tanjungpinang. Hal ini karena para wisman menganggap bahwa *cost* yang harus dikeluarkan untuk berwisata/rekreasi di Kota Tanjungpinang jauh lebih murah dibanding dinegara mereka. Sebenarnya hal ini dapat dijadikan sebagai pemicu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

TABEL III.4
PDRB KOTA TANJUNGPINANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1997 – 2001 (JUTAAN RUPIAH)
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Lapangan Usaha		Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	10.903,20	18.154,90	20.104,38	21.124,46	23.912,13
	1.1. Tanaman Pangan	3.485,14	5.045,04	5.977,70	6.124,68	7.059,83
	1.2. Perkebunan	97,67	135,81	148,57	156,49	179,75
	1.3. Peternakan dan Hasil-	6.648,13	10.773,50	11.397,10	11.937,67	13.279,99
	1.4. Kehutanan					
	1.5. Perikanan	672,26	2.200,55	2.581,01	2.905,62	3.392,56
2.	Pertambangan & Penggalian	992,52	938,68	964,05	1.040,51	1.191,89
	2.1. Pertambangan					
	2.2. Penggalian	992,52	938,68	964,05	1.040,51	1.191,89
3.	Industri Pengolahan	68.343,41	108.390,65	120.313,37	132.320,54	149.656,64
	3.1. Industri Besar/Sedang	59.739,81	95.246,82	104.739,48	115.168,58	130.650,08
	3.2. Industri Kecil dan	8.603,60	13.143,83	15.573,89	17.151,96	19.006,56
4.	Listrik, Gas dan Air	10.513,36	12.871,70	14.524,10	17.056,88	20.894,66
	4.1. Listrik	9.223,08	11.767,98	13.395,04	15.735,19	19.369,16
	4.2. Air Bersih	1.290,28	1.103,72	1.129,06	1.321,69	1.525,50
5.	Bangunan/Konstruksi	75.425,22	88.180,15	99.108,84	116.416,28	129.406,36
6.	Perdagangan, Hotel &	148.756,45	216.083,99	268.878,89	299.959,92	345.990,59
	6.1. Pedagang Besar dan	131.956,19	187.406,52	236.332,69	265.668,17	305.320,05
	6.2. Hotel	12.162,06	20.885,41	23.947,13	25.238,71	29.692,26
	6.3. Restoran	4.638,20	7.792,06	8.599,07	9.053,04	10.978,28
7.	Angkutan & Komunikasi	43.995,51	73.880,71	83.274,25	93.227,05	105.330,14
	7.1. Pengangkutan	35.801,16	61.493,69	70.377,92	78.142,76	88.528,21
	- Angkutan Darat	15.067,15	24.008,74	25.990,25	29.179,97	32.885,16
	- Angkutan Laut	17.159,45	33.176,55	39.971,97	43.928,77	50.062,04
	- Angkutan Udara	513,65	378,76	314,99	323,46	366,58
	- Jasa Penunjang	3.060,91	3.929,64	4.100,71	4.710,56	5.214,43
	7.2. Komunikasi	8.194,35	12.387,02	12.896,33	15.084,29	16.801,93
8.	Keuangan, Persew. & Jasa	61.192,50	69.501,10	63.713,49	66.571,45	75.367,95
	8.1. Bank	22.782,42	19.437,16	7.809,95	8.044,92	8.877,75
	8.2. Lembaga Keuangan	6.708,58	6.840,23	8.155,44	8.349,86	8.979,31
	8.3. Sewa Bangunan	30.793,47	42.147,13	46.649,51	48.965,56	56.179,06
	8.4. Jasa Perusahaan	908,03	1.076,58	1.098,59	1.211,11	1.331,83
9.	Jasa-jasa	59.878,68	87.734,52	94.474,06	104.547,16	121.829,70
	9.1. Pemerintahan Umum	42.488,69	62.001,43	67.146,42	74.005,94	88.552,97
	9.2. Swasta	17.389,99	25.733,09	27.327,64	30.541,22	33.276,73
	- Sosial Kemasyarakatan	1.938,59	2.166,46	2.279,14	2.657,72	3.041,60
	- Hiburan dan Rekreasi	2.157,67	3.173,65	3.396,57	3.921,56	4.524,83
	- Perorangan & Rumah	13.293,72	20.392,97	21.651,57	23.961,94	25.710,31
PDRB		480.000,85	675.736,40	765.355,43	852.264,25	973.580,06

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2002

TABEL III.5
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA TANJUNGPINANG ATAS DASAR HARGA
BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1997 – 2001 (%)
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Lapangan Usaha		Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	2,27	2,69	2,63	2,48	2,46
	1.1. Tanaman Pangan	0,73	0,75	0,78	0,72	0,73
	1.2. Perkebunan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	1.3. Peternakan dan Hasil-	1,39	1,59	1,49	1,40	1,36
	1.4. Kehutanan					
	1.5. Perikanan	0,14	0,33	0,34	0,34	0,35
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,14	0,13	0,12	0,12
	2.1. Pertambangan					
	2.2. Penggalian	0,21	0,14	0,13	0,12	0,12
3.	Industri Pengolahan	14,24	16,04	15,72	15,53	15,37
	3.1. Industri Besar/Sedang	12,45	14,10	13,69	13,51	13,42
	3.2. Industri Kecil dan Rumah	1,79	1,95	2,03	2,01	1,95
4.	Listrik, Gas dan Air	2,19	1,90	1,90	2,00	2,15
	4.1. Listrik	1,92	1,74	1,75	1,85	1,99
	4.2. Air Bersih	0,27	0,16	0,15	0,16	0,16
5.	Bangunan/Konstruksi	15,71	13,05	12,95	13,66	13,29
6.	Perdagangan, Hotel dan	30,99	31,98	35,13	35,20	35,54
	6.1. Pedagang Besar dan	27,49	27,73	30,88	31,17	31,36
	6.2. Hotel	2,53	3,09	3,13	2,96	3,05
	6.3. Restoran	0,97	1,15	1,12	1,06	1,13
7.	Angkutan dan Komunikasi	9,17	10,93	10,88	10,94	10,82
	7.1. Pengangkutan	7,46	9,10	9,20	9,17	9,09
	- Angkutan Darat	3,14	3,55	3,40	3,42	3,38
	- Angkutan Laut	3,57	4,91	5,22	5,15	5,14
	- Angkutan Udara	0,11	0,06	0,04	0,04	0,04
	- Jasa Penunjang	0,64	0,58	0,54	0,55	0,54
	7.2. Komunikasi	1,71	1,83	1,69	1,77	1,73
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	12,75	10,29	8,32	7,81	7,74
	8.1. Bank	4,75	2,88	1,02	0,94	0,91
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan	1,40	1,01	1,07	0,98	0,92
	8.3. Sewa Bangunan	6,42	6,24	6,10	5,75	5,77
	8.4. Jasa Perusahaan	0,19	0,16	0,14	0,14	0,14
9.	Jasa-jasa	12,47	12,98	12,34	12,27	12,51
	9.1. Pemerintahan Umum	8,85	9,18	8,77	8,68	9,10
	9.2. Swasta	3,62	3,81	3,57	3,58	3,42
	- Sosial Kemasyarakatan	0,40	0,32	0,30	0,31	0,31
	- Hiburan dan Rekreasi	0,45	0,47	0,44	0,46	0,46
	- Perorangan dan Rumah	2,77	3,02	2,83	2,81	2,64

		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2002

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Kota Tanjungpinang, sekalipun tidak dominan namun masih dapat menyumbang pada PDRB kota. Sejak krisis melanda perekonomian daerah, telah menyebabkan pergeseran struktur ekonomi. Apabila sektor – sektor unggulan mengalami penurunan, sektor pertanian setelah krisis ternyata mampu memberi kontribusi yang cukup besar namun kemudian menurun kembali. Berdasarkan Besaran PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Kota Tanjungpinang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 1997 – 2001, tahun 1997 sektor pertanian mampu memberi kontribusi sebesar 2,27 %, kemudian tahun 1998 naik menjadi 2,69 %, tetapi tahun berikutnya menurun secara berturut-turut menjadi 2,63 % tahun 1999, 2,48 % tahun 2000 dan 2,46 % tahun 2001. Dilihat dari peranan tiap sub sektor dari sektor pertanian, maka pada tahun 2001, kontribusi terbesar terhadap besaran pendapatan sektor pertanian adalah sektor peternakan dan hasil – hasilnya sebesar 1,36 %, kemudian sektor tanaman pangan sebesar 0,73 % dan sektor perikanan sebesar 0,35 % dan terakhir sektor perkebunan sebesar 0,02 %.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sub sektor yang berperan dalam sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor penggalian. Kontribusi sektor penggalian terhadap PDRB Kota Tanjungpinang dari tahun 1997 hingga tahun 2001 mengalami penurunan. Tahun 2000 dan tahun 2001, kontribusi sektor ini tetap yaitu sebesar 0,12 %. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 0,21 %.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan, dilihat dari kontribusi terhadap besaran PDRB Kota Tanjungpinang merupakan kegiatan kedua terbesar setelah sektor perdagangan. Sub sektor yang berperan dalam sektor industri pengolahan adalah sektor industri besar/ sedang serta sektor industri kecil dan rumah. Kontribusi kedua sektor tersebut tahun 1997 – 2001 bervariasi. Tahun 2001, kontribusi terhadap besaran PDRB kota dibandingkan tahun 2000, menurun. Sektor industri besar/ sedang memberikan kontribusi pada tahun 2001 sebesar 13,42 % sedangkan tahun 2000 telah mencapai 13,51 %. Demikian pula sektor industri kecil dan rumah tangga, kontribusi pada tahun 2001 sebesar 1,95 % lebih kecil bila dibandingkan tahun 2000 yang telah mencapai besaran 2,01 %.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air

Sub sektor yang berperan dalam sektor ini adalah sektor listrik dan air bersih. Sejak tahun 1999 – 2001, kontribusi sektor listrik dan air minum terhadap besaran PDRB kota, terus mengalami peningkatan. Kontribusi sektor listrik tahun 2001 sebesar 1,99 % lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya sebesar 1,85 %. Sedangkan sektor air minum tahun 2001 memberikan kontribusi yang sama sebagaimana tahun 2000 yaitu sebesar 0,16 %.

5. Sektor Bangunan / Konstruksi

Sektor bangunan/konstruksi, setelah krisis terjadi antara tahun 1997 - 1999 kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan secara berurutan adalah 15,71 %, 13,05 % dan 12,95 %. Sekalipun sempat meningkat pada tahun 2000 menjadi sebesar 13,66 % tetapi tahun 2001 menurun kembali menjadi 13,29 %.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang paling dominan di

Kota Tanjungpinang. Kontribusi sektor ini terhadap besaran PDRB dari sejak tahun 1997 hingga 2001 terus meningkat. Tahun 2001 kontribusi sektor perdagangan mencapai 35,54 % lebih besar 0,34 % dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 35,20 %. Hasil tersebut dicapai karena prestasi dan peranan dari sub sektor ini yaitu sub sektor pedagang besar dan eceran, sub sektor hotel dan sub sektor restoran, dari tahun 1997 sampai tahun 2001 memiliki jumlah yang terus meningkat. Kontribusi pedagang besar dan eceran pada tahun 2001, telah mencapai 31,36 % masih lebih besar bila dibandingkan tahun sebelumnya, hotel mencapai 3,05 % dan restoran mencapai 1,13 %.

Dilihat neraca perdagangan luar negeri melalui ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjungpinang, mengalami perkembangan sebesar 49,68 %. Tahun 2000 menghasilkan nilai dari selisih antara ekspor dan impor sebesar 39.620.312 USD, kemudian meningkat menjadi 59.303.848 USD pada tahun 2001.

TABEL III.6
EKSPOR DAN IMPOR BARANG MELALUI PELABUHAN TANJUNGPINANG
TAHUN 2001

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan (USD)	Perkembangan (%)
	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Berat (Kg)	Nilai (USD)		
2000	1.023.387	63.778.738	8.791.898	24.158.426	39.620.312	49,68
2001	1.078.616,924	61.248.744	553383,9	1.944.896	59.303.848	

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2002

7. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 10,82 % pada tahun 2001, merupakan kontribusi terbesar kelima setelah sektor perdagangan, industri pengolahan, bangunan/konstruksi dan jasa-jasa. Dibandingkan tahun 2000 dengan kontribusi sebesar 10,94 %, maka telah mengalami penurunan sebesar 0,12 %. Bila

dilihat dari sub sektor yang ada dalam sektor ini, keseluruhan sub sektor tersebut mengalami penurunan. Angkutan darat dari 3,42 % pada tahun 2000 menjadi 3,38 % pada tahun 2001, angkutan laut dari 5,15 % menjadi 5,14 %, jasa penunjang angkutan dari 0,55 % menjadi 0,54 % dan komunikasi dari 1,77 % menjadi 1,73 %. Sedangkan sub sektor angkutan udara antara tahun 2000 dan tahun 2001 memberikan kontribusi yang sama sebesar 0,04 %.

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor ini dari tahun 1997 hingga tahun 2001 memberikan kontribusi yang cenderung menurun, diawali dengan adanya krisis yang mempengaruhi perekonomian daerah. Apabila pada tahun 2000 memberikan kontribusi terhadap PDRB kota sebesar 7,81 % maka pada tahun 2001 menurun menjadi 7,74 %. Kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 12,75 %.

9. Sektor Jasa – jasa

Sektor jasa-jasa yang terdiri dari sub sektor pemerintahan umum dan swasta, pada tahun 2001 memberikan kontribusi sebesar 12,51 %. Dibandingkan tahun 2000 sebesar 12,27 %, telah mengalami peningkatan. Prestasi yang dicapai oleh sub sektor pemerintahan umum tahun 2001 memberikan kontribusi terbesar terhadap besaran sektor jasa-jasa yaitu sebesar 9,10 %, masih lebih besar dibandingkan tahun 2000. Sebaliknya sektor swasta telah mengalami penurunan, dari sebesar 3,58 % tahun 2000 menjadi 3,42 % tahun 2001.

3.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan, mengingat telah menggambarkan

kenaikan atau pertumbuhan yang riil karena telah memperhitungkan kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB dan Sektor di Kota Tanjungpinang melalui besaran PDRB, digunakan harga konstan dengan tahun dasar 1993. Hal ini mengingat tahun dasar 1993 telah mempertimbangkan perubahan struktur ekonomi akibat dampak deregulasi dan debirokratisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih realistis bila dihitung berdasarkan tahun dasar tersebut.

Pertumbuhan PDRB di Kota Tanjungpinang bervariasi. Tahun 1998, karena perekonomian daerah masih dipengaruhi krisis moneter, terjadi kemerosotan pertumbuhan sehingga mengalami kontraksi sebesar -5,09 %. Setelah keadaan ekonomi mulai membaik pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh positif mencapai 4,05 % pada tahun 1999 dan pertumbuhan tertinggi sehingga mencapai 5,98 % terjadi pada tahun 2000. Sekalipun tahun 2001 menurun menjadi sebesar 5,90 %, pertumbuhan masih tetap tinggi. Sedangkan tingkat pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Tanjungpinang antara tahun 1997 – 2001 adalah 2,71 % per tahun.

Apabila dilihat laju pertumbuhan tiap sektor kegiatan antara tahun 1997 - 2001, laju pertumbuhan positif tertinggi dicapai sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,93 % per tahun, disusul kemudian secara berturut-turut dicapai sektor listrik, gas dan air sebesar 6,86 %; sektor industri pengolahan sebesar 5,93 %; sektor jasa-jasa sebesar 3,95 %; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,79 %; serta sektor pertanian sebesar 1,32 %. Sedangkan sektor kegiatan yang mempunyai laju pertumbuhan negatif adalah sektor bangunan/konstruksi sebesar -0,72 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,50 %, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar -5,23 %.

TABEL III.7

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1996 - 2000(JUTAAN RUPIAH)
 (DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	7.085,94	7.390,22	7.345,80	7.449,00	7.461,75
	1.1. Tanaman Pangan	2.608,43	2.585,55	2.654,74	2.641,73	2.576,22
	1.2. Perkebunan	68,99	60,38	63,01	62,41	61,59
	1.3. Peternakan dan Hasil-	3.880,96	4.064,70	3.928,13	4.012,39	4.071,77
	1.4. Kehutanan					
	1.5. Perikanan	527,56	679,59	699,92	732,47	752,17
2.	Pertambangan & Penggalian	674,27	511,75	515,73	534,32	543,56
	2.1. Pertambangan					
	2.2. Penggalian	674,27	511,75	515,73	534,32	543,56
3.	Industri Pengolahan	51.382,16	51.062,64	55.466,96	58.709,98	64.496,14
	3.1. Industri Besar/Sedang	45.558,83	45.336,92	49.353,65	52.220,63	57.583,69
	3.2. Industri Kecil dan Rumah	5.823,33	5.725,72	6.113,31	6.489,35	6.912,45
4.	Listrik, Gas dan Air	8.270,91	8.490,21	9.162,60	9.716,08	10.767,80
	4.1. Listrik	7.331,19	7.704,19	8.360,21	8.856,18	9.885,27
	4.2. Air Bersih	939,72	786,02	802,39	859,90	882,53
5.	Bangunan/Konstruksi	55.451,83	45.913,83	48.152,95	51.076,42	52.790,03
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	120.034,18	116.411,79	122.486,50	132.019,67	138.827,27
	6.1. Pedagang Besar dan Eceran	107.739,53	102.508,21	107.325,66	115.614,41	120.510,68
	6.2. Hotel	8.858,92	10.157,49	11.074,74	11.952,59	13.443,32
	6.3. Restoran	3.435,73	3.746,09	4.086,10	4.452,67	4.873,27
7.	Angkutan dan Komunikasi	35.787,71	39.161,32	40.940,17	44.450,69	46.755,12
	7.1. Pengangkutan	28.605,20	31.002,92	32.545,39	35.255,48	36.744,10
	- Angkutan Darat	12.127,96	12.947,91	13.547,27	14.548,62	15.220,91
	- Angkutan Laut	13.786,79	15.393,19	16.271,32	17.768,84	18.459,16
	- Angkutan Udara	309,00	128,49	106,19	109,12	115,36
	- Jasa Penunjang	2.381,45	2.533,33	2.620,61	2.828,90	2.948,67
	7.2. Komunikasi	7.182,51	8.158,40	8.394,78	9.195,21	10.011,02
8.	Keuangan, Persew. & Jasa	48.714,63	39.499,56	36.171,86	36.713,14	38.514,00
	8.1. Bank	18.450,91	9.020,24	3.568,55	3.665,25	3.794,26
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan	4.641,87	3.728,77	4.294,71	4.308,90	4.423,61
	8.3. Sewa Bangunan	24.928,95	26.141,00	27.708,75	28.122,30	29.655,52
	8.4. Jasa Perusahaan	692,90	609,55	599,85	616,69	640,61
9.	Jasa-jasa	46.658,82	46.574,99	49.141,22	50.804,79	54.413,94
	9.1. Pemerintahan Umum	34.011,85	33.762,73	35.812,66	36.599,36	39.659,80
	9.2. Swasta	12.646,97	12.812,26	13.328,56	14.205,43	14.754,14
	- Sosial Kemasyarakatan	1.398,22	1.330,21	1.388,59	1.485,34	1.528,12
	- Hiburan dan Rekreasi	1.499,22	1.531,73	1.615,74	1.730,44	1.842,26
	- Perorangan dan Rumah	9.749,53	9.950,32	10.324,23	10.989,65	11.381,76
PDRB		374.060,45	355.016,31	369.383,79	391.474,09	414.569,61

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang 2002

TABEL III.8
LAJU PERTUMBUHAN PDRB DAN SEKTOR
MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 1998 - 2001(%)
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)				
		1998	1999	2000	2001	Rata ²
1.	Pertanian	4,29	-0,60	1,40	0,17	1,32
	1.1. Tanaman Pangan	-0,88	2,68	-0,49	-2,48	-0,29
	1.2. Perkebunan	-12,48	4,36	-0,95	-1,31	-2,60
	1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,73	-3,36	2,15	1,48	1,25
	1.4. Kehutanan					
	1.5. Perikanan	28,82	2,99	4,65	2,69	9,79
2.	Pertambangan dan Penggalian	-24,10	0,78	3,60	1,73	-4,50
	2.1. Pertambangan					
	2.2. Penggalian	-24,10	0,78	3,60	1,73	-4,50
3.	Industri Pengolahan	-0,62	8,63	5,85	9,86	5,93
	3.1. Industri Besar/Sedang	-0,49	8,86	5,81	10,27	6,11
	3.2. Industri Kecil dan Rumah	-1,68	6,77	6,15	6,52	4,44
4.	Listrik, Gas dan Air	2,65	7,92	6,04	10,82	6,86
	4.1. Listrik	5,09	8,52	5,93	11,62	7,79
	4.2. Air Bersih	-16,36	2,08	7,17	2,63	-1,12
5.	Bangunan/Konstruksi	-17,20	4,88	6,07	3,35	-0,72
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-3,02	5,22	7,78	5,16	3,79
	6.1. Pedagang Besar dan Eceran	-4,86	4,70	7,72	4,23	2,95
	6.2. Hotel	14,66	9,03	7,93	12,47	11,02
	6.3. Restoran	9,03	9,08	8,97	9,45	9,13
7.	Angkutan dan Komunikasi	9,43	4,54	8,57	5,18	6,93
	7.1. Pengangkutan	8,38	4,98	8,33	4,22	6,48
	- Angkutan Darat	6,76	4,63	7,39	4,62	5,85
	- Angkutan Laut	11,65	5,70	9,20	3,89	7,61
	- Angkutan Udara	-58,42	-17,36	2,76	5,72	-16,82
	- Jasa Penunjang Angkutan	6,38	3,45	7,95	4,23	5,50
	7.2. Komunikasi	13,59	2,90	9,53	8,87	8,72
8.	Keuangan, Persew. & Jasa Perus.	-18,92	-8,42	1,50	4,91	-5,23
	8.1. Bank	-51,11	-60,44	2,71	3,52	-26,33
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan	-19,67	15,18	0,33	2,66	-0,38
	8.3. Sewa Bangunan	4,86	6,00	1,49	5,45	4,45
	8.4. Jasa Perusahaan	-12,03	-1,59	2,81	3,88	-1,73
9.	Jasa-jasa	-0,18	5,51	3,39	7,10	3,95
	9.1. Pemerintahan Umum	-0,73	6,07	2,20	8,36	3,97
	9.2. Swasta	1,31	4,03	6,58	3,86	3,94
	- Sosial Kemasyarakatan	-4,86	4,39	6,97	2,88	2,34
	- Hiburan dan Rekreasi	2,17	5,48	7,10	6,46	5,30
	- Perorangan dan Rumah	2,06	3,76	6,45	3,57	3,96
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL	-5,09	4,05	5,98	5,90	2,71

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Ketiga sektor yang mengalami pertumbuhan negatif tersebut diawali saat krisis moneter mempengaruhi perekonomian daerah. Apabila dilihat peranan tiap sub sektor yang mengisi sektor bersangkutan kecuali sektor bangunan yang tidak diperinci per sub sektor, kontraksi yang dialami sektor bangunan/konstruksi terjadi tahun 1998 dengan pertumbuhan sebesar -17,20%. Saat itu harga barang kebutuhan bangunan/konstruksi melambung tinggi sehingga pengembangan sektor ini menjadi terhenti. Sub sektor penggalian yang berkaitan dengan sektor bangunan/konstruksi ikut terpengaruh dan mengalami kontraksi sebesar -24,10%. Sekalipun tahun berikutnya setelah kondisi perekonomian mulai membaik dan pertumbuhan sub sektor penggalian menjadi positif, tetapi tidak mampu mengangkat laju pertumbuhan sub sektor ini.

Sedangkan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa, sub sektor bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa perusahaan memiliki laju pertumbuhan yang negatif kecuali sewa bangunan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 4,45 % per tahun. Kontraksi yang terjadi pada sub sektor bank disebabkan kondisi perbankan nasional yang belum pulih sehingga nilai tambah sektor ini makin merosot. Sub sektor lembaga keuangan bukan bank dan jasa perusahaan yang memanfaatkan jasa perbankan ikut terpengaruh. Kontraksi yang dialami bank terjadi pada tahun 1998 sebesar -51,11% dan tahun 1999 sebesar -60,44%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,71% tahun 2000 dan 3,52% tahun 2001, tetapi masih tidak mampu meningkatkan laju pertumbuhan sektor bank.

Kondisi yang sama dialami oleh jasa perusahaan yang mengalami kontraksi sebesar -2,03% tahun 1998 dan -1,59% tahun 1999 dan tahun berikutnya naik dengan pertumbuhan yang positif. Berbeda dengan kedua sub sektor tersebut di atas, lembaga keuangan bukan bank hanya mengalami kontraksi pada tahun 1998 sebesar -19,67%, tahun 1999-2001 yang secara berturut-turut naik kembali dengan pertumbuhan sebesar

15,18%, 0,33% dan 2,66%. Sekalipun demikian laju pertumbuhan sub sektor lembaga keuangan bukan bank tidak mampu terangkat dan masih menunjukkan laju pertumbuhan negatif sebesar -1,73%.

3.3.2 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pertumbuhan PDRB kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pendapatan daerah Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Saat terjadi krisis pada tahun anggaran 1997/1998, pertumbuhan PAD mengalami kontraksi sebesar -0,50 % tetapi tahun berikutnya setelah keadaan perekonomian daerah mulai membaik, pertumbuhan PAD tahun anggaran 1998/1999 melonjak tajam sebesar 195,19 % dan tahun 1999/2000 pertumbuhan masih tetap tinggi mencapai 144,47 %. Dengan lonjakan pertumbuhan tersebut telah mengangkat laju pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang menjadi 113,05 % per tahun.

Peranan jenis penerimaan yang mengisi PAD kota cukup besar. Untuk melihat peranan tiap jenis penerimaan digunakan perhitungan persentase dengan cara membagi nilai setiap jenis penerimaan dengan nilai total seluruh penerimaan dikalikan 100, dengan hasil sebagaimana tercantum pada tabel Distribusi Persentase Pendapatan Daerah. Jenis penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 1999/2000 memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan daerah sebesar 44,87 %, disusul jenis penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 34,11 % dan Pajak Daerah sebesar 12,82 %. Penerimaan terkecil diperoleh dari Bagian Laba Usaha Daerah sebesar 2,18 %, yang baru diperhitungkan sejak tahun anggaran 1998/1999.

TABEL III.9
PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 - 1999/2000

(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Tahun Anggaran		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
I.	1996/1997	4.121.261.367,93	
II.	1997/1998	4.100.460.230,13	-0,50
III.	1998/1999	12.103.957.692,11	195,19
IV.	1999/2000	29.590.858.590,26	144,47
Per Tahun			113,05

Sumber : Hasil Analisis, 2003

TABEL III.10
DISTRIBUSI PERSENTASE PENDAPATAN
DI KOTA TANJUNGPINANG (%)
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 - 1999/2000
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

		1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
I.	Pajak Daerah	35,90	52,24	42,04	12,82
II.	Retribusi Daerah	29,62	24,84	6,17	2,23
III.	Pos Bgn Laba BUMD/ Bgn Laba Usaha Daerah	0,00	0,00	2,00	2,18
IV.	Pos Penerimaan Dinas-Dinas	0,00	0,00		
V.	Pos Pen. Lain-lain/ Pos Lain-lain Pendapatan	15,87	0,95	29,23	3,79
VI.A.	Bagi Hasil Pajak	18,40	21,78	11,64	44,87
VI.B.	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,21	0,18	8,92	34,11
Jumlah Keseluruhan		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Sektor perdagangan merupakan media yang diperlukan dalam upaya distribusi dan pemasaran produk pertanian dan industri tersebut. Sarana-sarana perdagangan perlu pula disediakan dan dikembangkan dari tingkat kota sampai tingkat desa.

3.3.3 Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan disini adalah sektor yang mampu diandalkan saat ini dan memiliki kecenderungan di masa datang masih merupakan sektor yang unggul dalam menunjang perekonomian kota. Kriteria yang digunakan untuk menilai sektor-sektor unggulan adalah :

- Kontribusi terhadap PDRB tinggi; dan
- Laju pertumbuhan tinggi

Penilaian terhadap peranan sektor-sektor yang mengisi PDRB Kota Tanjungpinang didasarkan pada Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan '93 yang diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing sektor dengan nilai seluruh sektor PDRB dikalikan 100. Hasil penilaian menunjukkan bahwa :

- Sekalipun laju pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran per tahun menduduki posisi ke lima sebesar 3,79%, peranan sektor ini paling dominan. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2001, mempunyai peranan di atas 30%. Pencapaian tertinggi sebesar 33,72% terjadi pada tahun 2000 dan selanjutnya turun menjadi 33,49%.
- Sektor industri pengolahan menempati dominasi kedua terbesar setelah sektor perdagangan. Tahun 2001 mempunyai peranan sebesar 15,56%. Peranan sektor ini sejak tahun 1997-2001 menunjukkan kenaikan, kecuali antara tahun 1999-2000 sempat menurun dari 15,02% menjadi 15,56%. Dengan laju pertumbuhan sebesar 5,93% yang berarti menempati urutan ketiga dari segi pertumbuhan, peranan sektor ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang.
- Sektor jasa-jasa menempati dominasi ketiga terbesar setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan. Tahun 2001 mempunyai peranan sebesar 13,12%. Dengan laju

pertumbuhan sebesar 3,95% yang berarti menempati urutan keempat dari segi pertumbuhan, sektor ini dapat diandalkan dalam perekonomian daerah.

- Sektor bangunan/konstruksi menempati dominasi keempat terbesar setelah sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa-jasa. Tahun 2001 mempunyai peranan sebesar 12,73%. Peranan sektor ini sejak tahun 1997 hingga tahun 2001 berfluktuasi, pencapaian tertinggi sebesar 14,82% terjadi pada tahun 1997. Laju pertumbuhan sektor bangunan/konstruksi negatif sebesar - 0,72% yang berarti menempati urutan ketujuh dari segi pertumbuhan.
- Sektor angkutan dan komunikasi menempati dominasi kelima terbesar setelah sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa-jasa dan bangunan/konstruksi. Tahun 2001 mempunyai peranan sebesar 11,28%. Dengan laju pertumbuhan yang menempati urutan pertama dari segi pertumbuhan yaitu sebesar 6,93%, peranan sektor ini di masa datang akan semakin meningkat. Sebagai sektor yang saat ini diunggulkan, di masa datang peranan sektor angkutan dan komunikasi tetap dapat diandalkan dalam perekonomian daerah.
- Sekalipun kondisi perbankan belum pulih sehingga mempengaruhi sektor keuangan, persewaan dan jasa, peranan sektor ini masih cukup tinggi yaitu sebesar 9,29% pada tahun 2001, tetapi laju pertumbuhan masih negatif sebesar -5,23%. Melihat pertumbuhan sektor tahun 1997-2001, nampaknya kondisi sektor ini akan membaik tercermin dari pertumbuhan sub sektor bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan, yang semakin meningkat.
- Sektor listrik, gas dan air, tahun 2001 mempunyai peranan sebesar 2,60% tetapi memiliki laju pertumbuhan yang menempati urutan kedua terbaik setelah sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 6,86%. Melihat kondisi ini, peranan sektor

di masa datang akan semakin meningkat, sekalipun bukan merupakan sektor unggulan, tetapi masih dapat diandalkan dalam perekonomian daerah.

- Sektor pertanian, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, mempunyai peranan yang semakin menurun, secara berturut-turut sebesar 1,99%, 1,90% dan 1,80%. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,32%, sektor ini di masa datang tidak dapat diandalkan dalam perekonomian daerah.
- Sektor pertambangan dan penggalian, mempunyai peranan terkecil hanya sebesar 0,13%, yang diperoleh dari sub sektor penggalian. Sejak tahun 1997 terus mengalami penurunan sehingga mencapai kondisi seperti sekarang ini. Dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -4,50%. Sehingga tidak dapat diandalkan.

TABEL III.11
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS HARGA KONSTAN '93 DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 1997-2001(%)
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Lapangan Usaha		Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	1,89	2,08	1,99	1,90	1,80
	1.1. Tanaman Pangan	0,70	0,73	0,72	0,67	0,62
	1.2. Perkebunan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,04	1,14	1,06	1,02	0,98
	1.4. Kehutanan					
	1.5. Perikanan	0,14	0,19	0,19	0,19	0,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,18	0,14	0,14	0,14	0,13
	2.1. Pertambangan					
	2.2. Penggalian	0,18	0,14	0,14	0,14	0,13
3.	Industri Pengolahan	13,74	14,38	15,02	15,00	15,56
	3.1. Industri Besar/Sedang	12,18	12,77	13,36	13,34	13,89
	3.2. Industri Kecil dan Rumah Tangga	1,56	1,61	1,66	1,66	1,67
4.	Listrik, Gas dan Air	2,21	2,39	2,48	2,48	2,60
	4.1. Listrik	1,96	2,17	2,26	2,26	2,38
	4.2. Air Bersih	0,25	0,22	0,22	0,22	0,21
5.	Bangunan/Konstruksi	14,82	12,93	13,04	13,05	12,73
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	32,09	32,79	33,16	33,72	33,49
	6.1. Pedagang Besar dan Eceran	28,80	28,87	29,06	29,53	29,07
	6.2. Hotel	2,37	2,86	3,00	3,05	3,24

	6.3. Restoran	0,92	1,06	1,11	1,14	1,18
7.	Angkutan dan Komunikasi	9,57	11,03	11,08	11,35	11,28
	7.1. Pengangkutan	7,65	8,73	8,81	9,01	8,86
	- Angkutan Darat	3,24	3,65	3,67	3,72	3,67
	- Angkutan Laut	3,69	4,34	4,40	4,54	4,45
	- Angkutan Udara	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03
	- Jasa Penunjang Angkutan	0,64	0,71	0,71	0,72	0,71
	7.2. Komunikasi	1,92	2,30	2,27	2,35	2,41
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus.	13,02	11,13	9,79	9,38	9,29
	8.1. Bank	4,93	2,54	0,97	0,94	0,92
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,24	1,05	1,16	1,10	1,07
	8.3. Sewa Bangunan	6,66	7,36	7,50	7,18	7,15
	8.4. Jasa Perusahaan	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15
9.	Jasa-jasa	12,47	13,12	13,30	12,98	13,12
	9.1. Pemerintahan Umum	9,09	9,51	9,70	9,35	9,57
	9.2. Swasta	3,38	3,61	3,61	3,63	3,56
	- Sosial Kemasyarakatan	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37
	- Hiburan dan Rekreasi	0,40	0,43	0,44	0,44	0,44
	- Perorangan dan Rumah Tangga	2,61	2,80	2,79	2,81	2,75
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang 2002

TABEL III.12
URUTAN PERANAN SEKTOR DAN LAJU PERTUMBUHAN DARI
TERTINGGI-TERENDAH
BERDASARKAN PDRB ATAS HARGA KONSTAN '93 DI KOTA
TANJUNGPINANG
(DIAMBIL DARI DATA KABUPATEN KEPRI)

Peranan Sektor Tahun 2001			Laju Pertumbuhan Th. 1997-2001	
	Sektor	(%)	Sektor	(%)
1	Perdagangan, Hotel &	33,49	Angkutan & Komunikasi	6,93
2	Industri Pengolahan	15,56	Listrik, Gas dan Air	6,86
3	Jasa-jasa	13,13	Industri Pengolahan	5,93
4	Bangunan/Konstruksi	12,73	Jasa-jasa	3,95
5	Angkutan & Komunikasi	11,28	Perdagangan, Hotel &	3,79
6	Keuangan, Persewaan & Jasa	9,29	Pertanian	1,32
7	Listrik, Gas dan Air	2,60	Bangunan/Konstruksi	-
8	Pertanian	1,80	Pertambangan & Penggalian	-
9	Pertambangan & Penggalian	0,13	Keuangan, Persewaan & Jasa	-

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan (*leading sector*) yang terdapat di Kota Tanjungpinang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; industri pengolahan; angkutan dan komunikasi; serta jasa-jasa.

3.3.4 Pendapatan Kota Tanjungpinang

Keuangan daerah pemerintah Kota Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2003 masih dibiayai oleh kabupaten induk yaitu Kabupaten Kepulauan Riau. Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bantuan keuangan biaya rutin dan bantuan pembangunan. Biaya rutin dipergunakan untuk belanja dan biaya pemeliharaan yang pada hakekatnya membenahi jalannya pemerintahan sebagai konsekwensi peningkatan status. Sedangkan biaya pembangunan banyak terserap untuk membiayai pembangunan daerah, perumahan dan pemukiman. Sebagai daerah otonom, pembenahan wilayah dan pemukiman memerlukan perhatian yang serius. Realisasi penerimaan Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel III.13.

TABEL III.13
REALISASI PENERIMAAN KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2003

No	Penerimaan daerah	2003
	Dana Alokasi Umum (DAU)	57.380.000.000
	a. Bantuan Kepada Kota Tanjungpinang	3.715.000.000
	b. Bantuan Pembangunan	53.665.000.000

Sumber : Kota Tanjungpinang dalam Angka tahun 2002

Selain penerimaan yang berasal dari bantuan pemerintah maka di kota Tanjungpinang juga memperoleh penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Realisasi penerimaan Kota Tanjungpinang yang berasal dari pendapatan asli daerah Tahun Anggaran (TA) 1999/2000 adalah Rp. 29.590.858.590,29-. Hasil ini lebih besar dibandingkan TA 1998/1999 sebesar 12.103.957.692,11-. Peranan terbesar dari

pendapatan daerah untuk TA 1999/2000 diperoleh dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 13.278.144.185,09,- selanjutnya disusul Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 10.092.149.927,79,-. Terbesar ketiga diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp. 3.793.069.480,-, dan terkecil diperoleh dari Bagian Laba Usaha Daerah sebesar Rp. 644.244.639,42,-.

TABEL III.14
PENDAPATAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TA 1999/2000

Jenis Penerimaan		JUMLAH
I.	Pajak Daerah	3.793.069.480,00
	004 Pajak Hotel & Restoran	932.550.968,00
	005 Pajak Hiburan	19.140.489,00
	006 Pajak Reklame	252.384.000,00
	007 Pajak Penerangan Jalan	1.467.178.160,00
	008 Pajak Pengolahan B. Galian Gol. C	1.121.815.863,00
	009 Pjk. Pemanfaatan Air B. Tnh & Air	248.000,00
II.	Retribusi Daerah	661.255.403,00
	001 Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.856.700,00
	002 Retribusi Pelayanan	75.595.000,00
	003 Retribusi Peng. B. Cetak KTP & Akte	46.927.500,00
	005 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	50.425.000,00
	012 Retribusi Pemakaian Kekayaan	97.955.192,00
	017 Retribusi Tempat Penginapan/Villa	946.000,00
	019 Retribusi Rumah Potong Hewan	2.363.000,00
	020 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	3.837.899,00
	025 Retribusi Izin Peruntukan Pengg.	77.908.062,00
	026 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	249.971.050,00
	029 Retribusi Izin Trayek	47.470.000,00
III.	Bagian Laba Usaha Daerah	644.244.639,42
	001 Bank Pembangunan Daerah	584.892.367,62
	002 Perusahaan Daerah	59.352.271,80
IV.	Pos Lain-lain Pendapatan	1.121.994.954,96
	002 Jasa Giro	1.000.786.520,96
	005 Set Kelebuhan Pembayaran Kpd	61.951.452,00
	006 Denda Keterlambatan Pelak. Pek.	2.962.857,00
	008 Angsuran Cicilan Rumah Dinas	33.820.975,00
	009 Pajak Yang Dihapuskan	5.205.400,00
	010 Retribusi Yang Dihapuskan	3.732.500,00
	011 Penerimaan Dinas-dinas	13.535.250,00
V.	Bagi Hasil Pajak	13.278.144.185,09
	001 Pajak Bumi dan Bangunan	7.248.038.647,00
	002 BPHTB	2.044.812.552,00
	003 Pajak Bahan Bakar Kendaraan	3.596.467.846,09

	004	Pajak Bagi Hasil Yg Terlanjur	388.825.140,00
V.		Bagi Hasil Bukan Pajak	10.092.149.927,79
	001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	416.489.447,79
	004	Landrent	0,00
	005	Pen. Dari	9.675.660.480,00
Jumlah Keseluruhan			29.590.858.590,26

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang

Sedangkan pendapatan perkapita penduduk kota Tanjungpinang dapat diketahui dari hasil pembagian antara PDRN (Produk Domestik Regional Netto) dengan penduduk pertengahan tahun. PDRN diperoleh dari hasil PDRB atas harga pasar (berlaku) dikurangi komponen penyusutan dan komponen pajak tak langsung netto. Hasil dari pengurangan tersebut merupakan PDRN atas dasar harga biaya faktor produksi atau dianggap sebagai Pendapatan Regional.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tahun 1997 – 2001 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1997 pendapatan per kapita hanya ± Rp 3,82 juta, tetapi empat tahun kemudian pendapatan telah menjadi ± Rp 6,44 juta. Apabila laju pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan seperti saat ini dan laju perkembangan penduduk tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi, di masa datang pendapatan regional per kapita akan semakin tinggi.

TABEL III.15
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA TAHUN 1997 - 2001
DI KOTA TANJUNGPINANG

Uraian		Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1	PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	480.000,85	675.736,40	765.355,42	852.264,25	973.580,06
2	Penyusutan Barang Modal	13.344,03	18.785,48	21.276,89	23.692,95	27.065,53

	(Juta Rp)					
3	Pajak Tak langsung Netto (Juta Rp)	20.735,92	20.101,65	33.063,17	36.817,61	42.058,43
4	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi (Juta Rp)	445.920,90	636.849,27	711.015,36	791.753,69	904.456,10
4	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	116.649	121.018	124.202	130.940	140.370
5	Pendapatan Regional Per Kapita (Juta Rp)	3,82	5,26	5,72	6,05	6,44

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2002

Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian antar PDRN (Produk Domestik Regional Netto) dengan penduduk pertengahan tahun. PDRN diperoleh dari hasil PDRB atas harga pasar (berlaku) dikurangi komponen penyusutan dan komponen pajak tak langsung netto. Hasil dari pengurangan tersebut merupakan PDRN atas dasar harga biaya faktor produksi atau dianggap sebagai Pendapatan Regional.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tahun 1997-2001 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1997 pendapatan per kapita hanya ± Rp 3,82 juta, tetapi empat tahun kemudian (tahun 2001) pendapatan telah menjadi ± Rp 6,44 juta meningkat hampir dua kali lipat. Apabila laju pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan seperti saat ini dan laju perkembangan penduduk tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi, di masa datang pendapatan regional per kapita akan semakin tinggi.

3.4. Kajian Umum Pajak Hotel Kota Tanjungpinang

3.4.1. Potensi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang

Intensifikasi Pajak Hotel adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan pajak hotel dengan cara melakukan pemungutan yang lebih

giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya.

Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sampai pada akhir tahun 2003 jumlah penginapan yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 62 buah, dengan perincian 35 buah hotel dan 27 buah wisma. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry dll.
- Fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel.

Kondisi tersebut sangatlah potensial terutama untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bago PAD Kota Tanjungpinang.

3.4.2. Collection Ratio Pajak Hotel Kota Tanjungpinang

Pada tabel 3.16 berikut ini terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Tanjungpinang meningkat, walaupun target yang diharapkan ternyata tidak terpenuhi. Untuk tahun 2002 target pendapatan yang terealisasi sebesar 88 % sedangkan pada tahun 2003 naik sebesar 89%. Kondisi ini dapat saja terjadi karena

estimasi target pemerintah yang terlalu tinggi terhadap penerimaan pajak hotel. Dibutuhkan kecermatan yang tinggi untuk menghitung target penerimaan, agar tidak terjadi penentuan target yang terlalu tinggi, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap beban dalam usaha pencapaiannya yang sangat tinggi. Target yang lebih realistis akan dapat lebih memfokuskan kegiatan – kegiatan pemenuhan target tersebut tanpa beban yang terlalu berat.

TABEL III.16
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA
TANJUNGPINANG
TAHUN 2002 DAN 2003

Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Dasar Hukum
	2002	2003	2002	2003	
Pajak Hotel	1.300.000.000	1.500.000.000	1.157.356.226	1.331.896.728	Perda No. 1 Th. 2004
	88%	89%			

Sumber : Dispenko Tanjungpinang tahun 2004 yang diolah

3.4.3. Effectiveness Pajak Hotel Kota Tanjungpinang

Secara umum potensi pajak hotel sangatlah besar. Selama ini mekanisme pemungutan pajak hotel mengacu pada sistem MAPATDA, yang didasarkan pada sistem pemungutan pajak daerah yaitu SELF ASESSMENT SYSTEM, dimana WP/WAPU menghitung dan memperhitungkan pajak hotel terhutang untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah cq. Dipenko Tanjungpinang dengan menggunakan media setoran sesuai dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam MAPATDA.

Self Asessment sistem mengandung kelemahan antara lain; WP/WAPU menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terhutang; WP/WAPU kemungkinan/diduga menggunakan pembukuan ganda, satu untuk laporan pajak dan

satu lagi untuk laporan perusahaan; kemungkinan konspirasi dengan petugas lapangan/Dipenko dalam perhitungan pajak/tagihan pajak.

Mekanisme tersebutlah yang menjadi salah satu kelemahan penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target. Diperlukan mekanisme yang lebih transparan dalam pemungutan pajak, sehingga kebocoran – kebocoran dapat dihindari.

3.4.4. Efisiensi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang

Untuk menutup atau mencegah kebocoran dan manipulasi dalam pembayaran pajak hotel antara lain dilakukan upaya; mengirim petugas/pegawai ke hotel-hotel pada malam-malam hari libur untuk memantau jumlah tamu yang menginap untuk di cross cek dengan laporan pajak mereka; secara insidental melakukan pemeriksaan buku penerimaan hotel; sekali setahun melakukan verifikasi, bekerjasama dengan BPKP perwakilan Propinsi Riau; memintakan laporan tingkat hunian hotel dari instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang; melakukan audit internal terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima oleh Dipenko Tanjungpinang. Pada periode tahun 2000 – 2003 terdapat kecenderungan peningkatan prosentase pendapatan, yaitu realisasi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan melebihi standard yang telah ditetapkan.

Kriteria hasil(yield); penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari, stabilitas penerimaan daerah dapat diukur dari rata-rata penyimpangan realisasi penerimaan dengan trend penerimaannya, semakin kecil rata-rata penyimpangan tersebut maka menunjukkan semakin stabil

penerimaannya dan sebaliknya semakin besar rata-rata penyimpangannya maka makin tidak stabil penerimaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat elastisitas penerimaan dan efisiensi serta efektifitasnya. Alat analisa lainnya adalah laju pertumbuhan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD.

$$\text{Elastisitas Penerimaan} = \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan Pajak Hotel}}{\% \text{ Perubahan Dasar Pengenaannya (PDRB, Jmlh Penduduk, Inflasi)}}$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Hasil Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan pajak hotel :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan : G_x = Laju pertumbuhan pajak hotel (PH) pertahun
 X_t = Realisasi penerimaan PH pada tahun tertentu
 $X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan PH pada tahun sebelumnya

Kontribusi pertumbuhan PH terhadap Pajak Daerah dan PAD:

$$\frac{X}{Y} \times 100\% \quad \text{dan} \quad \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan : X = Realisasi penerimaan PH
 Y = Realisasi penerimaan pajak
 Z = Realisasi PAD

3.4.5. Upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan aspek kelembagaan atau organisasi Dipenko Tanjungpinang, antara lain dengan menerapkan secara optimal sistem dan prosedur MAPATDA (sesuai Kepmendagri No.102 tahun 1990). Orientasi pada fungsi (by function) bukan orientasi pada sektor/bidang pungutan (by object) dengan memperbaiki fungsi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian yuridis, dengan membentuk Perda Kota Tanjungpinang tentang Pajak-pajak Daerah yang di dalamnya terdapat Pajak Hotel. Perda ini merubah Perda sebelumnya yang menyatukan pengaturan pajak hotel dan restoran (Perda Pemkab Kepri). Melakukan verifikasi bekerjasama dengan BPKP perwakilan Propinsi Riau, hasil temuan verifikasi dilakukan penagihan pajak hotel tertunggak, baik secara angsuran atau sekaligus.
2. Pengawasan dan pengendalian teknis, menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada WP hotel, antara lain dengan cara penyediaan blanko setoran dan penyediaan petugas untuk membantu pengisian media setoran dan sebagainya.
3. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan, yang lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi, seperti mewajibkan kepada

Kasubdin Pendaftaran dan Pendataan untuk selalu melaporkan dan memantau perkembangan tingkat hunian hotel. Mewajibkan kepada Kasubdin Pembukuan untuk setiap bulannya melaporkan kepada pimpinan realisasi penerimaan pajak hotel, tunggakan, dan tagihan.

Selain itu dilaksanakan pula peningkatan SDM pengelola pajak hotel, antara lain dengan mengikut sertakan Pegawai Dipenko Tanjungpinang pada kursus pengelolaan keuangan daerah, kursus bendahara khusus penerima (BKP), kursus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak daerah dan lain-lain.

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel/wajib pungut, dimana dalam tahun 2003 dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta memberikan insentif baik kepada wajib pajak atau wajib pungut pajak hotel. Kepada pengusaha hotel pembayar pajak terbaik diberikan hadiah 1% dari hasil pungutan pajak hotel. Kepada wajib pajak hotel, bill hotelnya diundi dan kepada pemenang diberikan hadiah

BAB IV

ANALISA INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL

DI KOTA TANJUNGPINANG

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara

Dalam studi analisis intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang ini, dilakukan beberapa analisis yang berkaitan satu sama lain. Analisis- analisis tersebut adalah analisis potensi pajak hotel, analisis pemungutan pajak hotel serta analisis intensifikasi pajak hotel. Analisis yang dilakukan dalam studi ini bersifat lebih kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik scoring serta untuk mengetahui potensi pajak hotel , serta analisis kualitatif untuk merumuskan arahan dan strategi-strategi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Tanjungpinang melalui upaya intensifikasi. serta analisis deskriptif kualitatif untuk mendukung analisis kuantitatif yang dilakukan.

4.1 Analisis Potensi, Collection Ratio Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

4.1.1 Potensi Pajak Hotel

Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry dll.
- Fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel

Sampai pada akhir tahun 2003 jumlah penginapan yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 62 buah, dengan perincian 35 buah hotel dan 27 buah wisma,

dimana statusnya 12 berbintang dan 50 melati Besar pajak yang dibebankan adalah 10% dari tarif bersih yang dibebankan kepada pelanggan. Dari data yang didapatkan dari Dinas Pariwisata terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penginapan baik hotel maupun wisma di Kota Tanjungpinang cukup bagus.

TABEL IV.1
PERTAMBAHAN JUMLAH HOTEL

Tahun	Hotel	Wisma
2001	32	18
2002	35	20
2003	35	27

Sumber : Tanjungpinang dalam angka 2004

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum peningkatan jumlah penginapan di Kota Tanjungpinang cukup, untuk hotel pertumbuhan terjadi sebesar 16% & sedangkan untuk wisma 11 %. Perkembangan aktifitas di Kota Tanjungpinang tentu saja memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah hotel di wilayah ini. Perdagangan dan Jasa serta pariwisata merupakan sector – sector unggulan yang secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh..

Dari 62 hotel tersebut akan dihitung potensi dari nilai pajak yang bisa didapatkan untuk pajak hotel. Beberapa asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Untuk hotel kelas melati diasumsikan mengelola 4 jenis kamar dengan tarif antara Rp. 70.000,- s/d Rp. Rp. 150.000,- per hari
- Untuk hotel kelas berbintang diasumsikan mengelola 6 jenis kamar dengan tarif antara Rp. 150.000,- s/d Rp. Rp. 1.000.000,- per hari

- Operasional hotel 1 tahun (360 hari) dengan occupancy rate sebesar 40 %
- Nilai pajak adalah 10 %

Berikut ini adalah hasil perhitungannya :

Dari hasil yang didapat dalam tabel diatas terlihat bahwa untuk hotel berbintang potensi pajak hotel dalam 1 bulan sebesar Rp. 198,384,000,- sedang untuk hotel melati

potensi pajak hotel sebesar Rp. 147,552,000,- dan total keseluruhan pajak selama 1 bulan sebesar Rp. 345.936.000,-. Dari besaran nilai pajak per bulan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun didapatkan besaran potensi pajak hotel di Kota Tanjungpinang adalah Rp. 4.151.232.000,-

Terlihat bahwa potensi riil dari Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang sangatlah tinggi, dengan asumsi tingkat occupancy 40 % didapatkan potensi pajak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2003 adalah lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan. Kesenjangan yang sangat besar antara potensi, target serta realisasi penerimaan pajak di Kota Tanjungpinang yang sangat tinggi ini, tentu saja harus lebih diperhatikan.

4.1.2 *Collection Ratio*

Dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hotel menuntut adanya konsistensi penerapan prosedur secara efektif dan efisien. Karena itu diperlukan adanya pengawasan yang mantap terhadap kegiatan operasional pemungutan pajak hotel. Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hotel adalah karena pada dasarnya di dalam setiap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sangat jarang berjalan persis sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga penyimpangan dan kesalahan mungkin saja dapat terjadi, untuk mencegah penyimpangan itu maka diperlukan pengawasan yang efektif.

Kriteria hasil(yield); penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari, stabilitas penerimaan daerah dapat diukur dari

rata-rata penyimpangan realisasi penerimaan dengan trend penerimaannya, semakin kecil rata-rata penyimpangan tersebut maka menunjukkan semakin stabil penerimaannya dan sebaliknya semakin besar rata-rata penyimpangannya maka makin tidak stabil penerimaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat elastisitas penerimaan dan efisiensi serta efektifitasnya. Alat analisa lainnya adalah laju pertumbuhan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD.

TABEL IV.4
TARGET & PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DI KOTA TANJUNGPINANG TH 2001 – 2003

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	(%)
2001	1.100.000.000	919.400.000	83,58
2002	1.300.000.000	1.157.300.000	89,02
2003	1.500.000.000	1.331.800.000	89,09

Sumber : Dipenda Kota Tanjungpinang, 2004

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum jika dilihat dari dari terget yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, terlihat bahwa *collection ratio* pada kurun waktu th 2001 – 2003 (3 tahun) cukup bagus yaitu rata – rata pemenuhannya sebesar 86,17 %. Jika dilihat dari besaran pajak yang diterima terjadi peningkatan sebesar rata – rata Rp. 206.200.000. Peningkatan yang cukup besar ini merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat serta potensi pertumbuhan perhotelan yang sangat bagus.

Hal lain yang dapat dilihat dari tabel tersebut adalah penetapan target harus lebih rasional dan operasional, artinya pemerintah harus dapat melihat kemampuan dari objek pajak, karena kondisi ini akan menyangkut kemampuan mereka dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD tidak hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau tahun pajak berjalan, tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak hotel dan restoran itu sendiri. Penetapan target dan strategi dalam merealisasikannya harus lebih rasional dan operasional, artinya pemerintah harus dapat melihat kemampuan dari objek pajak, karena kondisi ini akan menyangkut kemampuan mereka dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Pembangunan bidang ekonomi Kota Tanjungpinang dititikberatkan pada tiga sektor unggulan yaitu perdagangan, industri jasa dan transportasi. Ketiga sektor tersebut diharapkan merangsang perkembangan dan pertumbuhan sektor – sektor ekonomi yang lain. Kota ini memiliki potensi perdagangan, industri, jasa dan wisata, serta merupakan kota yang menjadi salah satu basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura-Growth Triangle) dan AFTA.

Beberapa tindakan/ langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu : (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah Daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak.

Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*. Selain itu Pajak daerah seharusnya “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

4.2 Analisis Pemungutan Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena mekanisme pemungutan yang belum terstruktur sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan baik mulai proses penghitungan maupun teknis pemungutannya.

Sistem perpajakan yang dianut memuat prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat menyesuaikan mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini berarti besaran pajak yang dikenakan bagi obyek pajak (hotel) berdasarkan banyaknya tamu hotel serta pelayanan yang diberikan hotel terhadap pengunjung.
2. Adil dan *merata* secara artinya sesuai dengan tingkatan / kemampuan dari tiap – tiap kelompok masyarakat dan berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. Transparansi dalam metode penghitungan besaran pajak sangatlah penting diketahui terutama oleh obyek pajak dalam rangka mekanisme control terhadap PAD pemerintah .
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Penyadaran bahwa sebagian besar hasil dari pajak nantinya akan digunakan dalam proses pemebangunan bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan efek positif bagi masyarakat.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. pajak yang dipungut harus memiliki kondisi perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Artinya keuntungan yang didapat oleh wajib pajak harus sesuai dengan apa yang dibayarkan..

Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat negara dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– *Memperluas basis penerimaan*

Antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial

– *Memperkuat proses pemungutan*

Antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan

– *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

– *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

– *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

4.3 Analisis Pengembangan Obyek dan Atraksi Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pajak Hotel

Dari hasil analisis potensi dan pemungutan pajak di Kota Tanjungpinang terlihat bahwa potensi yang sangat besar dari Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang belumlah dapat dimanfaatkan secara optimal. Mekanisme pemungutan dirasakan belumlah maksimal. Perbaikan dari kondisi tersebut tentu saja harus menjadikan prioritas penanganan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak hotel.

Disamping mengoptimalkan potensi dan pemungutan pajak, terdapat beberapa hal yang akan sangat mendukung upaya pemerintah terutama dalam hal intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang yang memiliki letak strategis merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan pariwisata. Sebagai calon ibukota Propinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang kegiatan perekonomian di wilayah ini berkembang dengan pesat. Sementara itu potensi pariwisata di Kota ini juga sangat besar, selain wisata budaya wisata alam juga merupakan kegiatan andalan di Kota ini. Beberapa potensi obyek wisata di Kota Tanjungpinang (pusat kebudayaan melayu) adalah sebagai berikut :

- Pulau Penyengat
- Ulu Riau yang didalamnya terdapat Pusat Kerajaan Ulu Ringga, Istana Kota Piring, Makam Daeng Marewa dan Daeng Celak

- Senggarang dengan Klenteng Tua yang sering dikunjungi rombongan wisatawan etnis china tidak hanya dari wilayah lain di Indonesia tapi juga wisatawan dari Singapura dan Malaysia.
- Wisata alam Pulau Sore
- Wisata alam Pulau Terkulai
- Rencana wisata bahari di Pulau Dompok

Disamping obyek – obyek wisata tersebut terdapat pula beberapa event – event yang rutin maupun non rutin yang pernah dilakukan di Tanjungpinang. Event – event ini tentu saja juga merupakan daya tarik pengembangan kegiatan pariwisata. Dragon Boat (perahu naga) setiap bulan Oktober serta Gawe Seni setiap bulan November merupakan event – event tetap yang sangat menarik perhatian wisatawan dalam maupun luar negeri. Sedangkan beberapa event pariwisata/ kesenian taraf nasional dan internasional yang pernah diadakan adalah PLURALISTIK serta Revitalisasi Budaya Melayu.

Event – event pariwisata dan keragaman aktifitas sosial budaya diatas merupakan aktifitas – aktifitas yang secara langsung maupun tidak langsung nantinya akan memberi dampak pada occupancy rate dari hotel di Kota Tanjungpinang. Peningkatan occupancy rate tersebut tentu saja akan meningkatkan pendapatan dari tiap – tiap hotel di Kota Tanjungpinang yang pada akhirnya juga akan meningkatkan potensi pajaknya. Potensi pajak hotel dengan asumsi occupancy rate sebesar 40 % adalah Rp. 4.151.232.000,- apabila tingkat occupancy tersebut dapat ditingkatkan maka nilai potensi pajak hotel tentu saja akan lebih besar.

4.4 Strategi Pengembangan Wisata dalam rangka Intensifikasi Pajak Hotel

Peningkatan pendapatan dari sektor pajak hotel saat ini walaupun masih memiliki berbagai kelemahan dalam usaha pengembangannya, namun dengan adanya kekuatan dan peluang diharapkan kelemahan dan ancaman tersebut dapat dihilangkan ataupun diantisipasi dan dieliminasi dampaknya. Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi pengembangan sebagai dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel, tentunya dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

4.4.1 Identifikasi Faktor Lingkungan Strategis

Salah satu teknik analisis yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik analisis SWOT yang diharapkan dapat menemukan strategi-strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan kawasan wisata Kota Tanjungpinang yang pada akhirnya akan berpengaruh pada manajemen intensifikasi pajak hotel. Identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut ini :

TABEL IV.5
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
Di KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN ANALISIS SWOT

Lingk Strategis	Faktor	Bidang	Uraian	Justifikasi
Internal	Kekuatan	Pariwisata	Letak yang strategis	dekat dengan pusat pertumbuhan asia tenggara (Singapura) sebagai pusat perdagangan serta kemudahan aksesibilitas
			Sumber wisata budaya (melayu)	Merupakan salah satu pusat kebudayaan melayu di dunia (dengan keberadaan Pulau

Lingk Strategis	Faktor	Bidang	Uraian	Justifikasi
				Penyengat dan Ulu Riau)
			Terdapat obyek wisata skala nasional & internasional	Selain pusat budaya melayu terdapat kelenteng tua di senggarang yang sering dikunjungi wisatawan dari malaysia maupun singapura
			Jenis obyek wisata bervariasi	Terdapat pula wisata alam dan bahari di Pulau Sore, Pulau Terkulai dan Pulau Dompok
			Terdapat Even – even tetap yang menarik	Dragon Boat dan Gawe Seni merupakan even tetap yang sangat menarik perhatian wisatawan
		Pajak Hotel	Lembaga Pengelola Yang Mantap	Penanganan secara teknis oleh Dipenda Kota Tanjungpinang
			Potensi Keberadaan Hotel yang cukup besar	Jumlah penginapan adalah 62 buah dengan 35 buah hotel dan 27 buah wisma
			SDM Dipenda Kota Tanjungpinang yang cukup memadai	Kualitas dan Kuantitas SDM sangat mendukung fungsi Dipenda
			Mekanisme penarikan yang bagus	Mekanisme penarikan pajak sudah tertata dengan rapi dengan Perda sebagai dasar hukumnya
	Kelemahan	Pariwisata	Kondisi Fisik Lingkungan di sekitar kaw wisata	Kondisi pemeliharaan lingkungan (kebersihan) masih sangat memperhatikan
			Manajemen pariwisata	Sifatnya masih parsial tiap – tiap obyek wisata belum terangkai dalam suatu sistem
			Sarana prasarana penunjang	Keberadaan fasilitas pendukung yang kurang memadai seperti toko souvenir, parkir dll
			Pengembangan obyek dan atraksi wisata	Beberapa obyek wisata masih belum sepenuhnya dapat dikelola oleh Dinas Pariwisata
		Pajak Hotel	Peningkatan ketrampilan SDM	Walaupun SDM sudah memadai namun peningkatan ketrampilan yang terkait dengan mekanisme pajak perlu terus menerus ditingkatkan
			Koordinasi lintas sektoral	Koordinasi kurang misal dengan pihak dinas pariwisata selaku pengelola obyek wisata
			Pembinaan	Belum terdapat upaya pembinaan terhadap wajib pajak
			Realisasi penerimaan yang belum sesuai target	Realisasi penerimaan belum sesuai dengan target yang ingin dicapai walaupun rata – rata sudah diatas 80%.
Eksternal	Peluang	Pariwisata	Permintaan pasar yang cukup tinggi	Kebutuhan akan wisata dari masyarakat lokal maupun wisatawan dari malaysia dan

Lingk Strategis	Faktor	Bidang	Uraian	Justifikasi
				singapura cukup tinggi
			Media promosi yang luas & cepat	Lokasi yang strategis serta perkembangan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan untuk promosi
			Kerjasama dengan pelaku wisata dari wilayah lainnya	Prospek menjalin kerjasama dengan biro perjalanan wisata dari batam bahkan malaysia dan singapura
			Investor mulai tertarik mengembangkan obyek wisata	Rencana pengembangan wisata bahari di Pulau Dompok adalah contoh nyata ketertarikan investor swasta di sektor ini
		Pajak Hotel	Prospek kegiatan pariwisata dan perdagangan jasa	Kedua aktivitas ini berkembang dengan pesat di Tanjungpinang sehingga dapat meningkatkan occupancy rate hotel
			Potensi penerimaan yang sangat besar	Hitungan analisis potensi menunjukkan sebesar kurang lebih 4,1 miliar
			Pertumbuhan Jumlah Hotel	Semakin berkembangnya aktifitas di Kota Tanjungpinang tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan penginapan
	Tantangan	Pariwisata	Kondisi Ekonomi dan Keamanan yang kurang stabil	Kondisi ini terutama keamanan sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan
			Keterbatasan pemahaman akan sistem informasi pariwisata	Aktor terkait belum paham mengenai pentingnya sistem informasi pariwisata
			Promosi belum optimal	Walaupun sudah ada kegiatan promosi namun belum semua media dimanfaatkan untuk kegiatan promosi ini.
			Masyarakat meninggalkan budaya melayu	Kegiatan bisnis dan perdagangan dikhawatirkan akan menggeser konservasi budaya
		Pajak Hotel	Tuntutan kemudahan bagi obyek pajak	Obyek pajak menuntut pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam melakukan
			Perkembangan teknologi informasi	SDM Dipenda harus selalu meningkatkan kualitas dalam rangka menghindari penipuan oleh obyek pajak

Sumber : Hasil Analisis 2005

4.4.2 Analisis Faktor Internal

Proses analisis terhadap faktor strategis internal meliputi kajian terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Formulasi dan design bidang kajian disusun dalam bentuk Matriks strategi internal dengan metode skoring. Berikut teknis penghitungannya :

TABEL IV.6
MATRIKS FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Faktor Internal	Uraian	Bobot	Rating	BxR	Justifikasi
Kekuatan					
Pariwisata	Letak yang strategis	0.06	3	0.18	dekat dengan pusat pertumbuhan asia tenggara (Singapura) sebagai pusat perdagangan serta kemudahan aksesibilitas
	Sumber wisata budaya (melayu)	0.06	4	0.24	Merupakan salah satu pusat kebudayaan melayu di dunia (dengan keberadaan Pulau Penyengat dan Ulu Riau)
	Terdapat obyek wisata skala nasional & internasional	0.06	3	0.18	Selain pusat budaya melayu terdapat kelenteng tua di senggarang yang sering dikunjungi wisatawan dari malaysia maupun singapura
	Jenis obyek wisata bervariasi	0.06	3	0.18	Terdapat pula wisata alam dan bahari di Pulau Sore, Pulau Terkulai dan Pulau Dompok
	Terdapat Even – even tetap yang menarik	0.06	3	0.18	Dragon Boat dan Gawe Seni merupakan even tetap yang sangat menarik perhatian wisatawan
Pajak Hotel	Lembaga Pengelola Yang Mantap	0.06	3	0.18	Penanganan secara teknis oleh Dipenda Kota Tanjungpinang
	Potensi Keberadaan Hotel yang cukup besar	0.06	4	0.24	Jumlah penginapan adalah 62 buah dengan 35 buah hotel dan 27 buah wisma
	SDM Dipenda Kota Tanjungpinang yang cukup memadai	0.06	3	0.18	Kualitas dan Kuantitas SDM sangat mendukung fungsi Dipenda
	Mekanisme penarikan yang bagus	0.06	3	0.18	Mekanisme penarikan pajak sudah tertata dengan rapi dengan Perda sebagai dasar hukumnya
Kelemahan					
Pariwisata	Kondisi Fisik Lingkungan di sekitar kaw wisata	0.06	2	0.12	Kondisi pemeliharaan lingkungan (kebersihan) masih sangat memperhatikan
	Manajemen pariwisata	0.06	2	0.12	Sifatnya masih parsial tiap – tiap obyek wisata belum terangkai dalam suatu sistem

Faktor Internal	Uraian	Bobot	Rating	BxR	Justifikasi
	Sarana prasarana penunjang	0.06	2	0.12	Keberadaan fasilitas pendukung yang kurang memadai seperti toko sovenir, parkir dll
	Pengembangan obyek dan atraksi wisata	0.05	2	0.1	Beberapa obyek wisata masih belum sepenuhnya dapat dikelola oleh Dinas Pariwisata
Pajak Hotel	Peningkatan ketrampilan SDM	0.06	1	0.06	Walaupun SDM sudah memadai namun peningkatan ketrampilan yang terkait dengan mekanisme pajak perlu terus menerus ditingkatkan
	Koordinasi lintas sektoral	0.06	2	0.12	Koordinasi kurang misal dengan pihak dinas pariwisata selaku pengelola obyek wisata
	Pembinaan	0.06	2	0.12	Belum terdapat upaya pembinaan terhadap wajib pajak
	Realisasi penerimaan yang belum sesuai target	0.05	2	0.1	Realisasi penerimaan belum sesuai dengan target yang ingin dicapai walaupun rata – rata sudah diatas 80%.
		1.00		2.6	

Sumber : hasil analisis, 2005

Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa factor strategi internal dalam kategori yang cukup tinggi (2,6). Dari hasil tersebut terlihat bahwa kekuatan yang dimiliki Kota Tanjungpinang dalam rangka intensifikasi pajak terkait dengan pengembangan pariwisata cukup besar. Kekuatan terbesar terutama dari potensi wisata budaya melayu yang sangat tinggi (Tanjungpinang sebagai pusat budaya melayu), potensi keberadaan hotel yang sangat besar.

4.4.3 Analisis Faktor Eksternal

Proses analisis terhadap faktor strategis eksternal meliputi kajian terhadap peluang dan tantangan yang dimiliki. Formulasi dan design bidang kajian disusun dalam bentuk Matriks strategi eksternal dengan metode skoring. Berikut teknis penghitungannya :

TABEL IV.7

Matriks Faktor Strategis Eksternal

Faktor Eksternal	Uraian	Bobot	Rating	BxR	Justifikasi
Peluang					
Pariwisata	Permintaan pasar yang cukup tinggi	0.08	3	0.24	Kebutuhan akan wisata dari masyarakat lokal maupun wisatawan dari Malaysia dan Singapura cukup tinggi
	Media promosi yang luas & cepat	0.08	3	0.24	Lokasi yang strategis serta perkembangan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan untuk promosi
	Kerjasama dengan pelaku wisata dari wilayah lainnya	0.08	3	0.24	Prospek menjalin kerjasama dengan biro perjalanan wisata dari Batam bahkan Malaysia dan Singapura
	Investor mulai tertarik mengembangkan obyek wisata	0.07	3	0.21	Rencana pengembangan wisata bahari di Pulau Dompok adalah contoh nyata ketertarikan investor swasta di sektor ini
Pajak Hotel	Prospek kegiatan pariwisata dan perdagangan jasa	0.08	3	0.24	Kedua aktivitas ini berkembang dengan pesat di Tanjungpinang sehingga dapat meningkatkan occupancy rate hotel
	Potensi penerimaan yang sangat besar	0.08	4	0.32	Hitungan analisis potensi menunjukkan sebesar kurang lebih 4,1 miliar
	Pertumbuhan Jumlah Hotel	0.07	3		Semakin berkembangnya aktifitas di Kota Tanjungpinang tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan penginapan
Tantangan					
Pariwisata	Kondisi Ekonomi dan Keamanan yang kurang stabil	0.08	2	0.16	Kondisi ini terutama keamanan sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan
	Keterbatasan pemahaman akan sistem informasi pariwisata	0.08	2	0.16	Aktor terkait belum paham mengenai pentingnya sistem informasi pariwisata
	Promosi belum optimal	0.07	2	0.14	Walaupun sudah ada kegiatan promosi namun belum semua media dimanfaatkan untuk kegiatan promosi ini.
	Masyarakat meninggalkan budaya melayu	0.07	2	0.14	Kegiatan bisnis dan perdagangan dikhawatirkan akan menggeser konservasi budaya
Pajak Hotel	Kondisi Ekonomi dan Keamanan yang kurang stabil	0.08	1	0.08	Obyek pajak menuntut pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam melakukan
	Keterbatasan pemahaman akan sistem informasi pariwisata	0.07	2	0.14	SDM Dipenda harus selalu meningkatkan kualitas dalam rangka menghindari penipuan

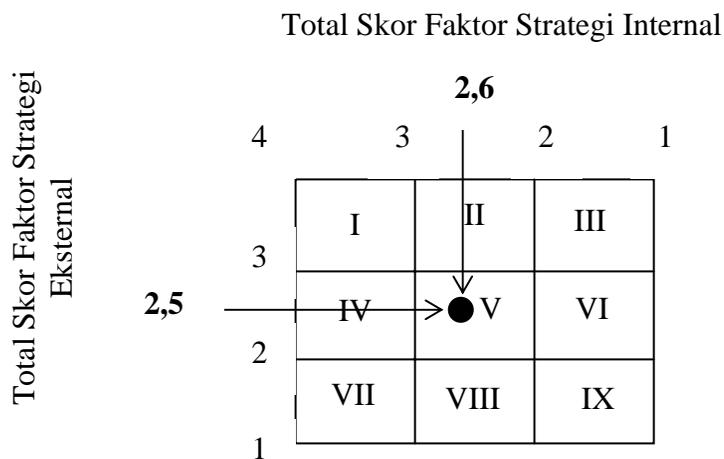
Faktor Eksternal	Uraian	Bobot	Rating	BxR	Justifikasi
		1.00		2.52	oleh obyek pajak

Sumber : hasil analisis, 2005

Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa factor strategi Eksternal dalam kategori yang cukup (2,52). Dari hasil tersebut terlihat bahwa peluang yang dimiliki Kota Tanjungpinang dalam rangka intensifikasi pajak terkait dengan pengembangan pariwisata cukup bagus. Kekuatan terbesar terutama dari permintaan kebutuhan wisata yang tinggi serta potensi penerimaan pajak hotel yang besar/

4.4.4 Matriks Intenal – Eksternal

Pada Matriks Internal – Eksternal, parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Total skor IFAS dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu lemah (skor 1 – 2) rata – rata (2 – 3) serta kuat (3 – 4) dengan demikian akan diperoleh 9 kuadran alternatif startegi



Pada prinsipnya ke 9 kuadran tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu :

a. Strategi Pertumbuhan dan ekstensifikasi

Strategi ini dilakukan bila skor internal dan eksternal bertemu pada kuadran I, II, V, VII atau VIII

b. Strategi peningkatan dan optimalisasi

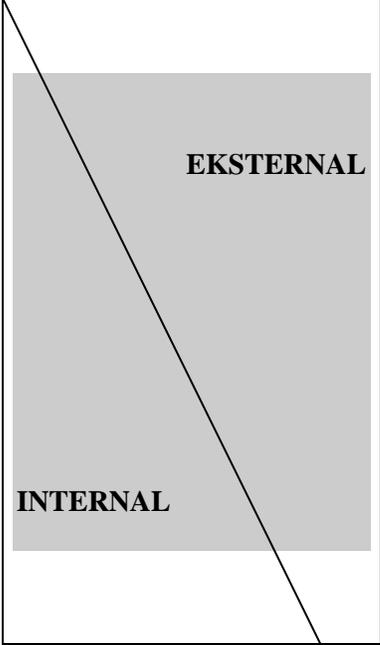
Strategi ini dilakukan bila skor internal dan eksternal bertemu pada kuadran IV atau V

c. Strategi stabilisasi dan efisiensi

Strategi ini dilakukan bila skor internal dan eksternal bertemu pada kuadran III, VI dan IX

Proses analisis dan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa matriks I – E jatuh pada kuadran V. Berdasarkan perhitungan dan analisis tersebut. Menunjukkan bahwa strategi intensifikasi pajak hotel melalui aktifitas pariwisata adalah strategi peningkatan dan optimalisasi.

TABEL IV.8
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN ANALISIS SWOT

	<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak yang strategis, dekat dengan pusat pertumbuhan asia tenggara (Singapura) sebagai pusat perdagangan serta kemudahan aksesibilitas - Sumber wisata budaya (melayu) yang potensial untuk dikembangkan. - Tingginya minat berinvestasi - Pengelolaan yang baik akan menjadikan simbiosis mutualisma bagi lintas sektor yang berada di kawasan tersebut. - Wisata budaya melayu yang sangat menonjol, serta keberadaap objek wisata bahari yang potensial. 	<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali - Kegiatan bisnis dan perdagangan dikhawatirkan akan menggeser konservasi budaya. - Belum adanya peraturan daerah yang melindungi kawasan cagar budaya dari kepentingan pembangunan kota/publik. - Kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan Indonesia yang kurang kondusif jika dikaitkan dengan pariwisata.
<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keunikan budaya dan bangunan purbakala menjadi daya tarik utama wisata - Keragaman atraksi dan even-even yang ditampilkan sepanjang tahun. - Aksesibilitas dan ketersediaan moda transportasi dalam kota maupun antar pulau serta sarana pendukung wisata lainnya sudah cukup bagus - Keberadaan fasilitas akomodasi yang memudahai (hotel & penginapan) - Kota Tanjungpinang merupakan salah satu pusat kebudayaan melayu tertua di Nusantara dan masih utuh tata cara kehidupan budaya dan pengaruhnya di masyarakat. - Perpaduan yang bagus antara kawasan wisata budaya, bahari dan wisata belanja - Banyaknya koleksi berbagai macam benda bersejarah. 	<p>Strategi memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang :</p> <p>Mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki yaitu daya tarik wisata budaya, belanja dan bahari, kemudahan aksesibilitas dan lokasinya di pusat pertumbuhan ekonomi dengan minat berinvestasi yang tinggi.</p> <p>Meningkatkan sarana promosi dan informasi sehingga lebih banyak wisatawan yang berkunjung. Membuka pasar baru dengan mengoptimalkan lokasinya yang strategis (dekat dengan Singapura dan Malaysia).</p> <p>Menjalin kerjasama secara regional dengan kawasan Singapura, Johor, Kepulauan Riau dengan konsep <i>Region State</i></p>	<p>Strategi memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman :</p> <p>Dengan pengelolaan yang lebih profesional akan terjadi sinergis yang menguntungkan baik bagi kegiatan bisnis perdagangan dengan pariwisata konservasi cagar budaya (simbiosis mutualisme) sehingga akan mendorong kemajuan pariwisata di kawasan ini yaitu dengan memadukan wisata budaya dan wisata belanja dalam satu kunjungan wisata. Peluang potensial investasi didorong untuk ikut bertanggung jawab dalam konservasi lingkungan sesuai dengan amanat UU Cagar Budaya. Perlu arah dan strategi yang jelas dalam pengembangannya dan harus dilindungi dan didukung dengan peraturan daerah yang melindungi kawasan cagar budaya Kota Tanjungpinang dari kepentingan pembangunan kota/publik.</p>

Kelemahan	Strategi mengatasi kelemahan dan mengisi peluang :	Strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan biaya sehingga kondisi bangunan kurang terawat dan terpelihara dengan baik. - Kurangnya pengawasan internal sehingga banyak benda / situs bersejarah yang hilang. - Keterbatasan sumber daya manusia sehingga pengelolaannya belum optimal dan profesional.. - Ketidakjelasan arah strategi dalam pengembangannya. - Ketidakpuasan pengunjung dalam mengakses semua bangunan bersejarah yang ada di keraton. - Kecenderungan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung dalam beberapa tahun terakhir. 	<p>Diperlukan kerjasama dengan pihak ke III atau swasta apalagi dengan banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan ini. Perlu segera adanya penyelesaian konflik intern keraton dan diharapkan dalam hal ini peran pemerintah sebagai mediator bagi kedua pihak yang bersengketa sehingga situasi yang tidak kondusif ini dapat segera diatasi.</p> <p>Meningkatkan manajemen pengelolaan keraton dengan penyegaran sumber daya manusia, mengoptimalkan kinerja dan fungsi-fungsi lembaga yang ada terutama bidang pengawasan terhadap aset-aset keraton.</p> <p>Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan serta menampilkan citra yang kuat dan khas sebagai wisata budaya sehingga selalu menarik untuk dikunjungi.</p>	<p>Kota Tanjungpinang sebagai kawasan cagar budaya dalam eksistensi dan proses perkembangannya memang menghadapi banyak permasalahan untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah, pihak swasta dan masyarakat maupun pihak pengelola sehingga kelemahan yang ada dapat dieliminasi dan ancaman yang akan muncul dapat diminimalisasi. Sehingga semua pihak ikut merasa memiliki, menjaga dan melestarikan warisan budaya yang tidak ternilai harganya ini. Perlunya kebijakan bagi para pengunjung dalam mengakses semua bangunan bersejarah yang ada di keraton. Menjalinkan kerjasama dengan obyek wisata sejenis atau biro perjalanan dalam tour kunjungan wisata. Menggali dan menampilkan citra baru yang lebih kuat lagi sehingga berbeda dengan citra obyek wisata sejenis yang lainnya sehingga bisa lebih menarik wisatawan.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak hotel ini tentu saja merupakan bagian dari upaya pengembangan Kota Tanjungpinang terutama dalam sektor pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata Tanjungpinang nantinya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Wisatawan yang datang akan melihat atraksi wisata yang ada seperti makam, bangunan kuno bersejarah, kesenian tradisional . Dengan pengembangan pariwisata diharapkan terjadi kemajuan pariwisata sebagai suatu industri salah satunya adalah akan semakin terbuka untuk

mengembangkan usaha dalam bidang hotel dan penginapan, peningkatan status hotel melati menjadi berbintang juga dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat..

Dari hasil analisis SWOT, kegiatan pariwisata di Kota Tanjungpinang saat ini walaupun masih memiliki berbagai potensi dan masalah. Oleh karena itu strategi-strategi yang telah dirumuskan diatas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata di Kota Tanjungpinang, tentunya dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sehingga menjadi harapan kita semua bahwa warisan budaya ini akan semakin berkembang dan tetap lestari sesuai dengan keunikan dan jati dirinya

Untuk mengembangkan permintaan wisata ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengoptimalkan informasi dan promosi wisata seluas mungkin, menjalin kerjasama lintas kota dan propinsi serta meningkatkan kerjasama satu kawasan Kepulauan Riau yang selama ini sudah terjalin dalam bidang pembangunan lainnya. Setelah kerjasama dan promosi gencar dilakukan harus didukung dengan peningkatan akses ke lokasi wisata sehingga bisa menjangkau lebih banyak wisatawan dan membuka pasar baru, hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan – pelabuhan laut yang sudah ada.

Mengacu pada konsep *pengembangan wilayah*, maka dari produk-produk pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang, maka Pulau Penyengat bisa dijadikan sebagai daya tarik utamanya dalam wisata budaya. Maka diperlukan kerjasama satu kawasan Kepulauan Riau (maupun dengan Singapura dan Malaysian yang merupakan negara serumpun Melayu) dengan menggali kembali potensi budaya, adat istiadat yang masih terpendam di kawasan wisata budaya ini. Selanjutnya, dibuat paket wisata dengan

tujuan utama Pulau Penyengat, baru kemudian ditarik ke kunjungan wisata yang ada di kawasan ini, misalnya wisata budaya Ulu Riau, Klenteng Tua di Senggarang, Wisata alam Pulau Sore dan Pulau Terkulai serta tentu saja wisata belanja.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah tanjungpinang dalam konteks peningkatan intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Peningkatan aktifitas perdagangan jasa serta pariwisata di Kota Tanjungpinang melalui pemberian insentif pajak dan perizinan yang mudah. Diharapkan peningkatan aktivitas perdagangan jasa serta pariwisata ini akan dapat menarik pengusaha atau wisatawan untuk beraktifitas di Kota ini.
- Optimalisasi target obyek pajak serta strategi dalam merealisasikannya harus lebih rasional dan operasional, artinya pemerintah harus dapat melihat kemampuan dari objek pajak
- Mengidentifikasi obyek pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, dimana data – data tersebut harus terintegrasi dalam sebuah sistem informasi.
- Memberikan insentif dan disinsentif bagi obyek pajak.
- Pengawasan internal bagi penarik pajak serta mekanisme penarikannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil – hasil penelitian yang telah didapatkan pada tahapan analisis pada bab sebelumnya, didapatkan beberapa temuan studi dan kesimpulan dari penelitian ini beserta rekomendasi .

4.4 Temuan Studi

Temuan Studi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- Secara umum peningkatan jumlah penginapan di Kota Tanjungpinang cukup, untuk hotel pertumbuhan terjadi sebesar 0% & sedangkan untuk wisma 11 %.
- Potensi pajak hotel berbintang dalam 1 bulan sebesar Rp. 198,384,000,- sedang untuk hotel melati potensi pajak hotel sebesar Rp. 147,552,000,- dan total keseluruhan pajak selama 1 bulan sebesar Rp. 345.936.000,-. Dari besaran nilai pajak per bulan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun didapatkan besaran potensi pajak hotel di Kota Tanjungpinang adalah Rp. 4.151.232.000,-
- Terlihat bahwa potensi riil dari Pajak Hotel di Kota Tanjungpinang sangatlah tinggi, dengan asumsi tingkat occupancy 40 % didapatkan potensi pajak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2003 adalah lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan
- Dari terget yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, terlihat bahwa *collection ratio* pada kurun waktu th 2001 – 2003 (3 tahun) cukup bagus yaitu rata – rata pemenuhannya sebesar 86,17 %. Jika dilihat dari besaran pajak yang

diterima terjadi peningkatan sebesar rata – rata Rp. 206.200.000. Peningkatan yang cukup besar ini merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat serta potensi pertumbuhan perhotelan yang sangat bagus.

4.5 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
- Beberapa tindakan/ langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- Disamping mengoptimalkan potensi dan pemungutan pajak, terdapat beberapa hal yang akan sangat mendukung upaya pemerintah terutama dalam hal intensifikasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang yaitu pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan pariwisata.
- Upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak hotel ini tentu saja merupakan bagian dari upaya pengembangan Kota Tanjungpinang terutama dalam sektor

pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata Tanjungpinang nantinya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat

4.6 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka intensifikasi pajak hotel Kota Tanjungpinang adalah :

- Meningkatkan iklim perdagangan jasa serta pariwisata di Kota Tanjungpinang yang lebih kondusif melalui pemberian insentif pajak dan perizinan yang mudah.
- Menetapkan target obyek pajak serta strategi dalam merealisasikannya dengan lebih rasional dan operasional.
- Mengidentifikasi obyek pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, dimana data – data tersebut harus terintegrasi dalam sebuah sistem informasi.
- Memberikan insentif dan disinsentif bagi obyek pajak.
- Melakukan pengawasan internal bagi penarik pajak serta mekanisme penarikannya.

RIWAYAT HIDUP



Armida Fentika, lahir pada tanggal 31 Mei 1968 di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Penulis menikah dengan seorang pria bernama Nurhilal Prayoga dan dikaruniai 2 orang putri bernama Artika Pratiwi (8 tahun) dan Bella Arimbi Putri (4 tahun) juga seorang putra bernama Cahya Putra Legawa (3 tahun). Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 5 Tanjungpinang lulus tahun 1981, SMP N 3 Tanjungpinang lulus tahun 1984, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tanjungpinang diselesaikan pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi di STIE INABA Bandung pada tahun 1993, sejak tahun 1999 sampai sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau kemudian pindah ke Pemerintah Kota Tanjungpinang dan sampai dengan saat ini bertugas di Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang..

Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang dan lulus pada Desember 2005 dengan judul Tesis "*Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjungpinang*".